

**Pengaruh Karakteristik *Good Corporate Governance* (GCG)  
Terhadap *Audit Delay* Pada Perbankan Syariah  
di OJK Tahun 2016-2020**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi  
pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh:

**WAHYU RISWAN**

2017/17043162

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2022

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

PENGARUH KARAKTERISTIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)  
TERHADAP AUDIT DELAY

(Studi Empiris Pada Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2016-2020)

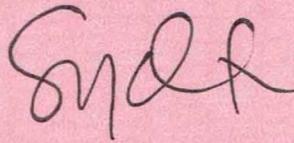
Nama : Wahyu Riswan  
NIM/TM : 17043162/2017  
Jurusan : Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi Sektor Manajemen  
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2022

Disetujui Oleh:

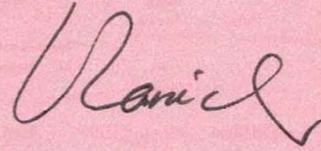
Ketua Jurusan Akuntansi

Pembimbing



Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, Ph.D

NIP. 19800103 200212 2 001



Vanica Serly, SE, M.Si

NIP.19861229 201504 2 002

## HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Padang

**Judul** : Pengaruh Karakteristik Good Corporate Governance ( GCG) Terhadap Audit Delay Pada Perbankan Syariah di OJK Tahun 2016- 2020

**Nama** : Wahyu Riswan

**NIM/TM** : 17043162/2017

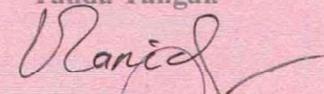
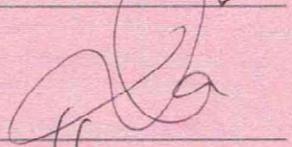
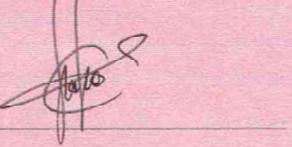
**Jurusan** : Akuntansi

**Keahlian** : Akuntansi Sektor Manajemen

**Fakultas** : Ekonomi

Padang, Agustus 2022

### Tim Penguji

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Vanica Serly,SE,M.Si	1. 
2.	Anggota	Dr.Deviani,SE,M.Si,Ak.	2. 
3.	Anggota	Charoline Cheisviyanny,SE,M.Akt	3. 

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Riswan  
NIM/TM : 17043062/2017  
Tempat/Tanggal Lahir : Padang/ 13 Mei 1998  
Jurusan : Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi Sektor Manajemen  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Komplek ITP, Jl Teknik Informatika Blok B1  
No. HP/Telepon : 0895-0421-0406  
Judul Skripsi : Pengaruh Karakteristik Good Corporate Governance ( GCG) Terhadap Audit Delay Pada Perbankan Syariah di OJK Tahun 2016- 2020

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan, kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Agustus 2022

Yang menandatangani,



Wahyu Riswan  
NIM. 17043162

## ABSTRAK

**Riswan. Wahyu. (17043162/2017). Pengaruh Karakteristik Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Audit Delay Pada Perbankan Syariah di Ojk Tahun 2016-2020**

**Pembimbing : Vanica Serly, S.E., M.Si.**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji karakteristik good corporate governance syariah terhadap audit delay. Populasi penelitian ini adalah sektor perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2016-2020. Sampel menggunakan metode purpose sampling dengan jumlah sampel sebanyak 11 perusahaan perbankan syariah.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari laporan tahunan perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap audit delay. Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap audit delay. Kepemilikan memiliki pengaruh positif manajerial terhadap audit delay. Dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap audit delay.

Kata kunci: Audit Delay; Tata Kelola Perusahaan; Komite Audit; Dewan Komisaris; Kepemilikan Manajerial; Dewan Pengawas Syariah

## ABSTRACT

**Riswan. Wahyu. (17043162/2017). Pengaruh Karakteristik *Good Corporate Governance (GCG)* Terhadap *Audit Delay* Pada Perbankan Syariah di Ojk Tahun 2016-2020**

**Pembimbing : Vanica Serly, S.E., M.Si.**

This research aims to examine the characteristics of good corporate governance sharia to audit delay. The population of this research is in the Islamic banking sector which is registered with the financial services authority (OJK) for the 2016-2020 period. The sample using the purpose sampling method with a total of 11 samples of Islamic banking companies.

The data used is secondary data from the company's annual report. The analytical method used is multiple linear regression analysis. The results of this analysis show that the audit committee has a positive effect on audit delay. The Board of Commissioners has a negative effect on audit delay. ownership has a positive managerial influence on audit delay. The sharia supervisory board has no effect on audit delay.

**Keywords:** Audit Delay; Corporate Governance; Audit Committee; Board of Commissioners; Managerial Ownership; Sharia Supervisory Board

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan berkah-Nya sehingga penulis diberikan kelancaran, kekuatan dan ketabahan hati dalam menyelesaikan tugas wajib penulis sebagai mahasiswa untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Negeri Padang, yaitu sebuah skripsi yang berjudul “*Pengaruh Karakteristik Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Audit Delay Pada Perbankan Syariah di Ojk Tahun 2016-2020*”. Skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan berbagai pihak yang berjasa memberikan bimbingan, semangat serta kritik dan saran. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Vanica Serly, SE, M.Si selaku dosen pembimbing atas semua bimbingan, motivasi serta kesediaan waktu memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Deviani, SE, M.Si, Ak selaku dosen penelaah untuk arahan, kritik dan saran sehingga skripsi ini menjadi karya yang lebih baik.
3. Ibu Charoline Cheisviyanny, M.Ak selaku dosen penguji untuk penilaian dan saran perbaikan terhadap skripsi ini.
4. Ibu Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, CA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang untuk semua kebijakan yang sudah ditetapkan.
5. Ibu Nurzi Sebrina, SE, Ak, CA selaku dosen pembimbing akademik yang sudah memberikan masukan dan arahan selama penulis melaksanakan studi.
6. Abang Rizki Anshari selaku admin prodi akuntansi yang sudah mempermudah segala urusan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teristimewa untuk kedua orang tua, Almarhum Mama, Bunda dan Papa yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, motivasi dan kekuatan kepada penulis. Terimakasih atas doa-doa luar biasa yang tidak ada hentinya serta kasih sayang yang tidak ternilai sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, rezeki dan kemudahan untuk mama dan papa, Aamiin.

8. Kedua saudara kandung tersayang, Abang Dany dan Adik Intan, terimakasih selalu memberikan kasih sayang, semangat dan motivasi sehingga penulis dapat memberikan yang terbaik hingga saat ini. Semoga selalu dimudahkan dalam pekerjaannya dan diberkahi keluarga kecilnya, Aamiin.
9. Lusi Putri Handayani orang yang saya sayangi ysenantiasa menemani, memberikan semangat, dan mendengarkan keluh kesah, selalu mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini dan memberikan do'a dari awal perkuliahan hingga skripsi ini selesai.
10. Teman-teman seperjuangan, Risky dan Josse Warsito yang dengan senang hati sudah membagi ilmunya untuk memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat tercinta, Rais, Ola, Raihan, Josse, Intan, Kevin, Risky dan Ninda yang senantiasa menemani dalam suka dan duka yang penulis lalui. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah, memberikan kritik dan saran serta selalu mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Semoga urusan sahabat-sahabat dimudahkan oleh Allah SWT, Aamiin.
12. Teman-teman akuntansi kelas D dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala yang teman-teman berikan kepada penulis. Semoga segala impian teman-teman dapat segera diwujudkan oleh Allah SWT, Aamiin.

Penulis menyadari tidak ada gading yang tak retak, begitu pula dengan penulisan skripsi ini, yang masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mohon kritik dan saran yang membangun untuk kebaikan penulis kedepannya. Penulis berharap semoga skripsi ini

dapat bermanfaat bagi banyak pihak terutama bagi penulis. Atas perhatiannya penulis ucapkan terimakasih.

Padang, 28 Agustus 2022

Wahyu Riswan

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A.Latar Belakang .....	1
B.Rumusan Masalah .....	9
C.Tujuan Penelitian .....	10
D.Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL HIPOTESIS</b> .....	<b>11</b>
A.Kajian Teori .....	11
1. Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ).....	11
2. <i>Audit delay</i> .....	12
3. <i>Good corporate governance</i> .....	14
4. Komite audit .....	22
5. Ukuran Dewan Komisaris .....	24
6. Kepemilikan Manajerial .....	26
7. Dewan Pengawas Syariah (DPS).....	28
B.Penelitian Terdahulu .....	30
C.Hubungan Antar Variabel dan Hipotesis .....	36
D.Kerangka Konseptual .....	41
E.Hipotesis.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>42</b>
A.Desain dan Jenis Penelitian.....	42
B.Populasi dan Sampel .....	43
C.Jenis dan Sumber Data .....	45
D.Metode Pengumpulan Data .....	45
E.Variabel Penelitian .....	46
F. Model dan Metode Analisis Data.....	46
G.Defenisi Operasional.....	52
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>55</b>
A.Gambaran Umum BEI dan Perusahaan Sektor Keuangan.....	55
1. Gambaran Umum Bursa Efek Indonesia (BEI).....	55
2. Gambaran Umum Perusahaan Sektor Keuangan.....	57
B.Analisis Deskriptif .....	57
1. Analisis Deskriptif.....	57
2. Statistik Deskriptif.....	70
3. Uji Asumsi Klasik .....	72
4. Teknik Analisis Data .....	76
5. Uji Hipotesis .....	79
C.Pembahasan.....	82
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>89</b>
A.Kesimpulan .....	89
B.Keterbatasan .....	89
C.Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. <i>Audit delay</i> Perusahaan Perbankan Syariah .....	3
Tabel 2. Penelitian Terdahulu .....	32
Tabel 3. Kriteria Pengambilan Sampel .....	44
Tabel 4. Sampel Penelitian.....	44
Tabel 5. Penilaian DW (Durbin-Watson).....	50
Table 6. Perhitungan <i>Audit delay</i> Bank BRI Syariah tahun 2016-2020 .....	58
Table 7. Data <i>Audit delay</i> tahun 2016-2020.....	59
Table 8. Komite Audit Perbankan Syariah Tahun 2016-2020 .....	61
Table 9. Dewan Komisaris Perbankan Syariah 2016-2020 .....	63
Table 10. Kepemilikan Manajerial pada Perbankan Syariah Tahun 2016-2020 ..	66
Table 11. Dewan Pengawas Syariah Pada Perbankan Syariah Tahun 2016-2020	68
Table 12. Statistik Deskriptif .....	70
Table 13. Uji Normalitas.....	73
Table 14. Uji Multikolenieritas .....	74
Table 15. Pengambilan Keputusan Autokorelasi .....	76
Table 16. Uji Autokorelasi.....	76
Table 17. Regresi Linear Berganda.....	77
Table 18. Hasil Analisis Determinan (Model Summary) .....	78
Table 19. Hasil Uji t.....	79
Table 20. Uji F .....	81

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konseptual .....	38
Gambar 2 Uji Heterokedastisitas .....	75

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perusahaan perbankan termasuk perbankan syariah merupakan perusahaan sektor keuangan yang memiliki tanggung jawab besar kepada *stakeholder*, salah satunya investor. Jadi, apabila terjadi penundaan pada penyampaian laporan keuangan, maka dapat mempengaruhi relevansi dari laporan keuangan dan berdampak pada pengambilan keputusan investor (Aryaningsih, 2014). Terjadinya penundaan laporan keuangan dapat diartikan oleh investor sebagai pertanda buruk bagi perusahaan dengan kemungkinan disebabkan oleh tingkat laba yang rendah dan tingkat hutang yang tinggi (Aryaningsih, 2014).

Laporan keuangan merupakan instrumen yang penting yang menjembatani informasi antara perusahaan dengan pihak luar. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang digunakan sebagai informasi oleh investor, calon investor, manajemen, kreditor dan para pengguna lainnya (Anam, 2017). Laporan keuangan juga memiliki fungsi sebagai suatu instrument untuk mengukur kinerja perusahaan. Para pengguna laporan keuangan membutuhkan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu dalam pengambilan keputusan (Anam, 2017).

Pentingnya ketepatan waktu pelaporan keuangan bagi pengambilan keputusan menjadikan faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* sebagai objek yang menarik untuk diteliti. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Halim (2018), *audit delay* merupakan rentang waktu antara tanggal tutup buku dengan tanggal pelaporan laporan keuangan. Semakin lama rentang *audit delay*, maka

semakin tidak tepat waktu. Ketepatan waktu merupakan salah satu syarat relevansi dan keandalan penyajian laporan keuangan, namun pada penerapannya ketepatan waktu pelaporan terdapat banyak kendala (Halim (2018)).

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 12 /PJOK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga atau 90 hari setelah tanggal tutup buku tahunan. Artinya, Bank Umum Syariah memiliki batas waktu *audit report lag* selama 90 hari. *Audit delay* atau yang dikenal juga sebagai *audit report lag* didefinisikan sebagai selisih waktu antara berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan audit.

Fenomena *audit delay* di Indonesia bukanlah hal yang baru. Berdasarkan informasi dari [idx.co.id](http://idx.co.id), BEI mengutarakan bahwa per 31 Desember 2017 terdapat 10 emiten yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan audit dan per Desember 2018 juga ada 10 emiten yang melakukan hal serupa. Penyampaian laporan keuangan yang tidak tepat waktu juga terjadi di kalangan emiten sehingga per 31 Desember 2019 BEI, mendata adanya 64 emiten yang belum melaporkan keuangan audit ([idx.co.id](http://idx.co.id)) (Adhika & Ary, 2021). Pada tahun 2020, Bursa Efek Indonesia (BEI) memutuskan untuk memberikan sanksi kepada 23 emiten karena terlambat melaporkan kinerja keuangan interim untuk periode September 2020. Sanksi yang dikenakan bursa atas keterlambatan ini berupa Peringatan Tertulis II dan denda sebesar Rp 50 juta. Terdapat satu perusahaan bahkan belum menyampaikan

laporan keuangan audit Juni 2020 dan sudah dikenakan sanksi yang sama (cnbcindonesia.com, 2021).

Fenomena *audit delay* juga terjadi pada perusahaan perbankan syariah. Tabel 1 di bawah menunjukkan lama hari penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit. Berikut data lama hari penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit tahun 2016-2010, secara lengkap dan berturut-turut selama periode penelitian.

**Tabel 1. *Audit delay* Perusahaan Perbankan Syariah**

No	Nama Perusahaan	2016	2017	2018	2019	2020
		LH	LH	LH	LH	LH
1	BRI Syariah	48	40	84	34	26
2	BNI Syariah	26	52	32	27	20
3	Bank Syariah Mandiri	30	45	32	34	18
4	Bank Muamalat	48	75	67	24	90
5	Bank Panin Dubai Syariah	48	59	56	56	88
6	Bank Mega Syariah	83	85	51	64	53
7	Bank BTPN Syariah	39	24	22	65	41
8	Bank Bukopin Syariah	55	82	63	51	109
9	Bank Jabar Banten Syariah	27	17	25	38	57
10	Bank Victoria Syariah	40	64	53	57	120
11	BCA Syariah	6	18	25	27	25
	<b>Rata-Rata</b>	<b>41</b>	<b>51</b>	<b>46</b>	<b>43</b>	<b>59</b>

Sumber: Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) Keterangan LH : Lama Hari

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit secara keseluruhan semakin memburuk dari tahun sebelumnya yaitu dengan rata-rata mengalami *audit delay* 59 hari/.Namun jika dilihat masing-masing perusahaan bahwa Bank Syariah Mandiri, memperoleh masa *audit delay* paling singkat yaitu 18 hari pada tahun 2020, sedangkan Bank Victoria Syariah mengalami *audit delay* paling lama yaitu 120 hari. Keterlambatan informasi akan menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar modal karena di dalam laporan keuangan terdapat informasi laba yang dihasilkan perusahaan, yang dijadikan sebagai salah satu dasar

pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual kepemilikan yang dimiliki investor.

Beberapa penelitian sebelumnya melaporkan bahwa tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini dikarenakan tata kelola perusahaan yang baik akan mengurangi kemungkinan terjadinya masalah akuntansi yang kelak akan menyulitkan auditor eksternal untuk mengidentifikasinya. Penugasan audit akan lebih lama selesai jika laporan keuangan yang akan diaudit penuh dengan kesalahan material. Fama dan Jensen 1983 menyatakan bahwa tata kelola perusahaan yang baik dapat mengurangi risiko yang timbul (David M & Butar, 2020).

Upaya perusahaan untuk mendorong tata kelola perusahaan yang baik dapat diwujudkan dengan membentuk Komite Tata Kelola. Sejumlah perusahaan publik diketahui telah membentuk Komite Tata Kelola. Fungsi utama komite ini adalah memastikan bahwa kebijakan, standar atau prosedur yang telah ditetapkan perusahaan ditaati di seluruh lini organisasi dan mengusulkan perbaikan untuk meningkatkan tata kelola yang baik. Penelitian David M & Butar (2020) keberadaan komite tata kelola berhubungan positif dan signifikan dapat menurunkan *audit delay* karena kebijakan pelaporan keuangan telah sesuai dengan aturan yang ada. Waktu yang diperlukan auditor eksternal untuk memverifikasi transaksi yang mencurigakan menjadi berkurang dan *audit delay* dengan sendirinya menurun.

Penerapan *good corporate governance* (GCG) berkaitan dengan pada teori agensi, yaitu teori agensi menjelaskan hubungan antara manajemen dengan pemilik. Menurut Jensen & Meckling (1976) hubungan manajer dan

pemilik berada dalam kerangka hubungan keagenan. Dalam hal ini pihak prinsipal sebagai pemilik akan memberikan informasi kepada pihak agen sebagai manajer untuk melakukan pengolahan informasi. Hasil pengolahan informasi dapat digunakan dalam pengambilan keputusan bagi pihak prinsipal. Faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pengimplementasian teori agensi adalah *audit delay* (Rasmini, 2016).

Penerapan *good corporate governance* (GCG) menurut Agoes (2016) dipengaruhi oleh beberapa komponen, yaitu ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit. Variabel terikat yang peneliti gunakan adalah variabel yang berada diluar perusahaan, dimana fungsinya adalah mengawasi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Biasanya *audit delay* berhubungan dengan earning, audit fee, kualitas audit/kualitas auditor, beban kerja auditor, ukuran/kompleksitas perusahaan, kinerja perusahaan, internal control dan tata kelola seperti yang dijelaskan diatas dengan indicator yang relative dan hati-hati.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad & Henri (2021), dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *audit delay*, Komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*, Rapat komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit delay*, Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit delay* padaperusahaan sektor industri penghasil bahan baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2019. Banyaknya variabel berkaitan dengan *good corporate governance*, peneliti membatasi penelitian mengenai variabel ukuran dewan komisaris, komite

audit, kepemilikan manajerial serta faktor tambahan adalah dewan pengawas syariah.

Dewan komisaris merupakan salah satu komponen dalam mekanisme *corporate governance*. Dewan Komisaris ialah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang memiliki tugas untuk mengawasi baik secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan komisaris independen meminta auditor untuk melaporkan laporan keuangan lebih tepat waktu sehingga informasi laporan keuangan menjadi lebih berkualitas dan dapat mengurangi *audit report lag* (Swami & Latrini, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Jao (2018: 11–12) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap *audit delay*. Semakin banyak dewan komisaris akan mendorong anggota yang berfokus terhadap masing-masing departemen. Dewan komisaris akan memantau dan berkoordinasi dengan manajemen untuk menjalankan tugasnya dengan lebih efektif.

Komite audit merupakan salah satu bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan dalam melakukan pengendalian internal. Komite audit adalah salah satu elemen kunci dalam struktur *corporate governance* yang membantu mengendalikan dan mengawasi manajemen. Bapepam melalui surat edaran KEP-643/BL/2012 merekomendasikan perusahaan publik untuk membentuk komite audit. Komite audit menjalankan peran penting dalam mengawasi operasi dan system pengendalian internal perusahaan dengan tujuan melindungi kepentingan pemegang saham. Jika, semakin banyak jumlah komite audit, maka *audit report lag* yang dialami semakin singkat, begitu

sebaliknya. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad & Henri (2021) didapatkan hasil bahwa Komite audit berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *audit delay*. Penelitian yang dilakukan Mustofa, (2018: 1–23) didapatkan hasil yang sama bahwa variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Penelitian yang dilakukan oleh Kaaroud et al., (2020) didapatkan hasil bahwa keahlian komite audit dan rapat komite audit secara signifikan terkait dengan luasnya *audit report lag*. Namun, independensi dewan, komite audit dan komite Syariah keahlian tidak secara signifikan terkait dengan tingkat *audit report lag*. Hasil studi ini mendukung harapan teori keagenan, karena dapat disimpulkan bahwa masalah keagenan (*audit report lag*) dapat dimitigasi dengan memiliki mayoritas anggota komite audit dengan keuangandan/atau latar belakang akuntansi, dan ini akan meningkatkan efektivitas fungsi komite audit atas proses keuangan.

Komponen lain yang dalam *corporate governance* yaitu kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan (Abdul, 2015). Kinerja manajer dapat dimotivasi dengan menerapkan kebijakan manajerial diperusahaan dimana kebijakan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan manajer terlibat dalam kepemilikan saham, sehingga dengan keterlibatan ini kedudukan manajer setara dengan para pemegang saham. Fitria (2016) menyatakan dengan semakin banyak saham yang dimiliki oleh manajemen maka semakin kuat motivasi manajer untuk bekerja dalam meningkatkan nilai saham perusahaan.

Penyajian laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu akan mendorong harga saham karena pengguna dapat menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Dengan adanya kepemilikan manajerial perusahaan tidak akan menunda pelaporan keuangan dan hal itu berarti manajer telah bekerja dengan baik sehingga auditor dapat memeriksa laporan keuangan dengan mudah dan tidak terjadi *audit delay*. Penelitian yang dilakukan oleh Made et al., (2019) didapatkan hasil bahwa Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2017-2019.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah salah satu unsur unik yang terdapat dalam tata kelola Islam. DPS terdiri atas ulama yang memiliki keilmuan yang mumpuni di bidang syariah diberikan kepercayaan untuk mengawasi implementasi syariah pada lembaga keuangan syariah. DPS fokus mendorong pemenuhan prinsip syariah mulai dari pengambilan kebijakan hingga mengawasi implementasinya, termasuk dalam pengambilan risiko yang dilakukan manajemen. DPS diharapkan dapat meminimalisir kebijakan manajemen terkait pemberian pinjaman dan pengambilan risiko yang agresif (Luthan, 2021). Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah, maka dapat diharapkan *audit report lag* yang dialami semakin singkat, begitu sebaliknya. Penelitian yang dilakukan oleh Azizah & Erinosi (2020) didapatkan bahwa dewan pengawas syariah tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perbankan syariah.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, Penelitian terdahulu mengenai *audit delay* kebanyakan menggunakan objek perusahaan konvensional. Adapun penelitian ini menggunakan objek Bank Umum Syariah sebagai objek penelitian. Penelitian ini juga menambahkan variabel dewan pengawas syariah, sementara masih jarang penelitian terdahulu yang menggunakan dewan pengawas syariah dan mengaitkan *audit delay*. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Karakteristik *Good corporate governance* (GCG) Terhadap *Audit delay* Pada Perusahaan Perbankan Syariah di BEI tahun 2016-2020.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *audit delay* Pada Perusahaan Perbankan Syariah di BEI tahun 2016-2020?
2. Apakah Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap *audit delay* Pada Perusahaan Perbankan Syariah di BEI tahun 2016-2020?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *audit delay* Pada Perusahaan Perbankan Syariah di BEI tahun 2016-2020?
4. Apakah dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap *audit delay* Pada Perusahaan Perbankan Syariah di BEI tahun 2016-2020?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap *audit delay* Pada Perusahaan Perbankan Syariah di BEI tahun 2016-2020
2. Menguji dan menganalisis pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap *audit delay* Pada Perusahaan Perbankan Syariah di BEI tahun 2016-2020
3. Menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *audit delay* Pada Perusahaan Perbankan Syariah di BEI tahun 2016-2020
4. Menguji dan menganalisis pengaruh dewan pengawas syariah terhadap *audit delay* Pada Perusahaan Perbankan Syariah di BEI tahun 2016 -2020

### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu khususnya dalam bidang *audit delay* dan dapat digunakan untuk membantu memecahkan berbagai masalah yang ada.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi untuk penelitian berikutnya dengan topik yang sama.
2. Manfaat Praktis
  - a. Hasil dari penelitian ini sangat bermanfaat bagi Bank Umum Syariah di Indonesia untuk sarana diagnosis dalam mencari sebab masalah atau kegagalan yang terjadi dalam *audit report lag*.

- b. Pelaksanaan penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan pertimbangan bagi manajemen agar penyajian laporan keuangan auditan dapat dihasilkan tepat waktu sehingga dapat bermanfaat bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi.

## BAB II

### KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

#### A. Kajian Teori

##### 1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara pihak *agen* (manajemen) dengan *principal* (pemegang saham). Menurut Jensen & Meckling (1976) hubungan manajer dan pemilik berada dalam kerangka hubungan keagenan. Dalam hal ini pihak prinsipal sebagai pemilik akan memberikan informasi kepada pihak agen sebagai manajer untuk melakukan pengolahan informasi. Hasil pengolahan informasi dapat digunakan dalam pengambilan keputusan bagi pihak prinsipal. Faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pengimplementasian teori agensi adalah *audit delay* (dan Rasmini, 2016).

Teori agensi yang dikembangkan Jensen & Meckling (1976) mengasumsikan bahwa semua individu bertindak untuk kepentingan mereka sendiri. Hubungan keagenan timbul karena adanya kontrak antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen perusahaan (*agent*) yang merupakan pengelola perusahaan, dalam kontrak tersebut pemilik memberikan wewenang kepada manajemen untuk menjalankan operasi perusahaan termasuk dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi, tidak ada jaminan bahwa manajemen perusahaan mengutamakan kepentingan pemilik perusahaan (Brealey & Marcus, 2008).

*Audit delay* mempunyai hubungan erat dengan ketepatan waktu publikasi laporan keuangan, karena manfaat laporan keuangan menjadi berkurang apabila tidak disampaikan secara tepat waktu. Berkurangnya nilai

informasi yang disampaikan kepada prinsipal merupakan dampak dari keterlambatan diterbitkannya laporan audit. Lebih lanjut, teori agensi berkaitan dengan penerapan *good corporate governance* terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Dengan adanya dewan komisaris, kepemilikan manajerial, komite audit ditambah dengan dewan pengawas Syariah (DPS) di harapkan dapat memperpendek waktu audit dan mengurangi adanya asimetris informasi antara pihak agen atau manajemen dengan pihak prinsipal atau pemegang saham, sehingga laporan keuangan dapat disampaikan secara transparan kepada prinsipal.

## **2. *Audit delay***

### **a. *Pengertian Audit delay***

Menurut Boyhton, Johnson (2015), *Audit delay* adalah jarak waktu penyelesaian pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan, diukur berdasarkan jarak waktu antara tanggal penutupan buku 31 Desember sampai dengan tanggal laporan auditor independen yang tercatat pada laporan keuangan yang disajikan oleh auditor. Sedangkan menurut Rudianto (2012) *Audit delay* atau dengan kata lain *Audit report lag* (ARL) dapat didefinisikan sebagai selisih lamanya waktu antara akhir tahun fiskal perusahaan dengan tanggal yang tertera pada laporan auditor independen.

*Audit delay* atau yang dikenal juga sebagai *audit report lag* merupakan lamanya waktu penyelesaian audit dihitung dari akhir tahun fiskal perusahaan sampai dengan tanggal laporan audit dikeluarkan. *Audit delay* mengimplikasikan bahwa laporan keuangan disajikan pada suatu

interval waktu. Menurut Suwardjono (2015), *audit delay* adalah perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan yang mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor. Proses audit sendiri merupakan proses yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kredibilitas pada laporan keuangan perusahaan.

Mulyadi (2017) menjelaskan, *audit delay* merupakan jeda waktu yang dibutuhkan auditor dalam menyelesaikan tugasnya, yaitu diukur dari tanggal tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan auditor independen. Lamanya proses penyelesaian audit akan berdampak pada reaksi investor maupun masyarakat umum. Sehingga akan berakibat pada ketidakpastian dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi para pemakai laporan keuangan

Peran interval waktu audit bagi auditor adalah untuk mengukur kinerja auditor dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan pendapat berupa opini audit bagi perusahaan yang sedang diaudit. Lamanya waktu penyelesaian audit dapat berdampak pada ketepatan waktu penyajian informasi laporan keuangan untuk dipublikasikan kepada pihak yang membutuhkan sehingga memengaruhi derajat ketidakpastian dalam pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang dipublikasikan (Simatupang et al., 2018: 45–62).

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan, *audit delay* merupakan rentang waktu yang dibutuhkan auditor dalam menyelesaikan tugas auditnya yang dihitung secara kuantitatif dari tanggal penutupan tahun

buku sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan auditor independen. *Audit delay* ini akan menyebabkan terlambatnya perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangannya kepada publik, sehingga akan mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja perusahaan

**b. Metode Pengukuran *Audit delay***

*Audit delay* diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor independen atas audit laporan keuangan tahunan perusahaan, sejak tanggal tutup tahun buku perusahaan yaitu per 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen. *Audit delay* diukur secara kuantitatif yaitu jumlah hari yang dihitung dari tanggal penutupan tahun buku hingga diterbitkannya laporan auditor independen. Variabel ini diukur dengan rumus (Mulyadi, 2017):

$$\text{Audit delay} = \text{Tanggal Laporan Audit} - \text{Tanggal Laporan Keuangan}$$

**3. *Good corporate governance***

**a. Pengetian *Good corporate governance***

Hamdani (2016) mendefinisikan *corporate governance* sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. *The Indonesian Institute for Corporate governance* (IICG) mendefinisikan GCG sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan pihak petaruh lainnya. Selain pemenuhan

kepentingan para pemegang saham, GCG dimaksudkan untuk menjamin sustainability.

*Good corporate governance* (GCG) merupakan sebagai tata cara kelola perusahaan sehat yang sudah diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF). Konsep ini diharapkan dapat melindungi pemegang saham (*stockholder*) dan kreditor agar dapat memperoleh kembali investasinya. Indonesia mulai menerapkan prinsip GCG sejak mendatangi *Letter of intent* (LOI) dengan IMF, yang salah satu bagian pentingnya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Komite Nasional *Corporate governance* (KNKCG) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab yang menerapkan standar GCG yang telah diterapkan standar internasional (Sutedi, 2016).

Definisi ini menunjukkan bahwa *corporate governance* dapat berfungsi untuk membangun kepercayaan, menjalin kerja sama, dan menciptakan visi bersama antara semua pihak yang terlibat dalam perusahaan sehingga masalah keagenan dapat diantisipasi.

#### **b. Mekanisme *Good corporate governance***

Pengelolaan perusahaan (*corporate governance*) itu sendiri dapat diartikan secara luas pada literatur yang ada dan terbatas. Secara terbatas, istilah tersebut berkaitan dengan hubungan antara manajer, direktur, auditor dan pemegang saham, sedangkan secara luas istilah pengelolaan perusahaan dapat meliputi kombinasi hukum, peraturan, aturan pendaftaran dan praktik pribadi yang meningkatkan perusahaan menarik modal masuk, memiliki

kinerja yang efisien, menghasilkan keuntungan, serta memenuhi harapan masyarakat secara umum dan sekaligus kewajiban hukum. Keberadaan organ-organ tambahan tersebut memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pelaksanaan *good corporate governance*. Organ tambahan untuk melengkapi penerapan GCG (Agoes, 2017), yaitu : 1. Dewan Komisaris 2. Kepemilikan Manajerial 3. Komite audit.

#### 1. Dewan Direksi

Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal I Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Agar pelaksanaan tugas direksi dapat berjalan secara efektif, salah satu prinsip yang perlu dipenuhi adalah komposisi direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat, dan cepat, serta dapat bertindak independen (KNKG, 2016).

#### 2. Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (KNKG, 2016). Keberadaan komisaris independen telah

diatur Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEJ Tanggal 1 Juli 2000. Dikemukakan bahwa perusahaan yang listeddi bursa harus mempunyai komisaris independen yang secara profesional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham minoritas (bukan *controlling Shareholders*). Dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris.

### 3. Komite audit

Ikatan Komite audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris, dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari corporate governance di perusahaan-perusahaan. Bapepam melalui Surat Edaran No. 03/PM/2000 yang ditujukan kepada setiap direksi emiten dan perusahaan publik mewajibkan dibentuknya komite audit. Pengaturan mengenai jumlah komite audit bagi emiten dan perusahaan publik diatur dalam Peraturan Bapepam -LK No.IX.I.5 tentang Pembentukan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite audit. Dalam peraturan tersebut emiten dan perusahaan publik diwajibkan membentuk komite audit yang berjumlah sekurang-kurangnya tiga orang dimana salah satunya merupakan komisaris independen perusahaan dan bertindak sebagai ketua komite audit.

#### 4. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah jumlah saham yang dimiliki oleh manajer dalam suatu perusahaan. Manajer berperan sebagai pemegang saham akan menghindari pelaporan keuangan yang menyesatkan. Karena manajer ikut berperan pula sebagai investor dan pengawas dalam perusahaan yang menginginkan laporan keuangan bersifat relevan dan dapat bertanggung jawabkan. Dengan kata lain, kepemilikan manajerial akan menghindari terjadinya penginformasian laporan keuangan yang tidak sesuai, sehingga tingkat informasi yang dimiliki oleh manajer dan stakeholder tidak memiliki perbedaan (Pradipta & Yulius, 2015)

#### 5. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah proposi kepemilikan saham pada akhir tahun yang dimiliki oleh lembaga, seperti asuransi, bank atau institusi lain. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen. Adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen (Abdullah, 2014).

Widyati (2013) menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh institusi merupakan salah satu monitoring *agents* penting yang memainkan peranan aktif dan konsisten dalam melindungi investasi

saham yang ditanamkan dalam perusahaan. Mekanisme monitoring tersebut akan menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham.

**c. Tujuan *Good corporate governance* (GCG)**

Penerapan GCG dilingkungan BUMN dan BUMD mempunyai tujuan sesuai KEPMEN BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2001 pada pasal 4, yaitu :

1. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisiensi, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.
3. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial BUMN terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim investasi nasional.
6. Mensukseskan program privatisasi.

#### **d. Prinsip-Prinsip *Good corporate governance* (GCG)**

Menurut buku pedoman GCG pada PTSB (2013), dalam tata kelola perusahaan yang baik seluruh kegiatan pengelolaan perusahaan akan selalu dilandasi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. *Transparancy* (keterbukaan) : yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Perusahaan akan menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada seluruh stakeholders, sehingga pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dengan perusahaan, seperti pemegang saham, Bapepam, Bursa Efek, pegawai, pelanggan, pemasok dan stakeholders lainnya, mengetahui resiko yang mungkin terjadi dan keuntungan yang dapat diperoleh dalam melakukan transaksi dengan perusahaan, sekaligus ikut serta dalam mekanisme pengawasan terhadap jalannya perusahaan
2. *Accountability* (akuntabilitas) : yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ-organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas menciptakan pengawasan efektif yang mendasarkan pada keseimbangan hak dan tanggungjawab antara pemegang saham, dewan komisaris dan direksi. Akuntabilitas mencerminkan aplikasi mekanisme sistem internal checks and balances yang mencakup praktik-praktik yang sehat. Direksi bertanggungjawab dalam kegiatan operasional sehari-hari dan dewan komisaris mewakili pemegang saham dalam pelaksanaan pengawasan atas jalannya perusahaan.

3. *Responsibility* (tanggungjawab) : yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Perusahaan memenuhi dan mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk didalamnya pemenuhan hak-hak stakeholders, keselamatan dan kesehatan kerja, dan penghindaran dari praktik bisnis yang tidak sehat. Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap mereka yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan.
4. *Independency* (Kemandirian) : yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Direksi dalam menjalankan tugas-tugas kepengurusan perusahaan dan dewan komisaris dalam melaksanakan peran pengawasan atas jalannya perusahaan bebas dari intervensi pihak luar.
5. *Fairness* (Kewajaran) : yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap *stakeholders* tersebut diberikan perlindungan, kesempatan dan perlakuan yang wajar untuk menuntut jika terjadi pelanggaran terhadap hak mereka.

#### 4. Komite audit

##### a. Pengertian Komite audit

Komite audit adalah suatu unsur dalam kerangka *good corporate governance* yang diharapkan agar mampu memberikan kontribusi tinggi dalam level penerapannya. Dengan adanya komite audit dalam perusahaan diharapkan agar mampu mengoptimalkan mekanisme *checks and balances*, yang pada akhirnya ditunjukkan untuk memberikan perlindungan yang optimum kepada para pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya. Tugas komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan. Hal tersebut mencakup review terhadap sistem pengendalian internal yang ada pada perusahaan, kualitas laporan keuangan perusahaan, dan efektivitas fungsi audit internal (Lukviarman, 2016:203). Peran dan tanggung jawab komite audit dituangkan dalam bentuk piagam komite audit dan harus memperoleh persetujuan dewan komisaris dan ditinjau ulang secara reguler.

Komite audit ini merupakan orang yang melakukan pengawasan terhadap perusahaan. Adanya komite audit diharapkan mampu mengontrol dan memonitor keputusan yang dilakukan manajer itu sudah benar yang berarti bahwa keputusan tidak memihak suatu pihak, namun mengikat semua pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan. Komite audit dituntut dapat bertindak secara independen, independensi komite audit tidak dapat dipisahkan moralitas yang melandasi integritasnya. Hal ini perlu didasari karena komite audit merupakan pihak yang menjembatani antara

eksternal auditor dan perusahaan yang juga sekaligus menjembatani antara fungsi pengawasan dewan komisaris dengan internal auditor (Agus, 2017).

Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh dewan direksi kepada dewan komisaris. Menurut Astuti, (2019) berpendapat bahwa keberadaan komite audit setidaknya terdiri dari tiga anggota, yang salah satunya independen dan juga menjadi ketua komite audit, sementara yang lain adalah pihak eksternal yang independen.

Menurut Tricker Lukviarman (2016), menyatakan bahwa peran komite audit berhubungan dengan tugas memberikan nasihat dan masukan terkait; sistem pengendalian internal manajemen, pengawasan dan monitoring terhadap audit internal, komunikasi dengan KAP, memberi laporan kepada dewan komisaris terhadap proses dan isu audit, melakukan review terhadap informasi keuangan yang akan disampaikan kepada pemegang saham dan pihak lainnya yang berkepentingan, memberikan masukan tentang berbagai hal terkait akuntabilitas dewan komisaris, serta memastikan kepatuhan terhadap implementasi CG sesuai dengan peraturan atau standar yang telah ditetapkan.

#### **b. Metode Pengukuran Komite audit**

Menurut Gibson (2016), untuk menghitung proporsi komite audit dalam perusahaan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Komite Audit} = \frac{\text{Komisaris Independen dalam Komite Audit}}{\text{Total Komite Audit}}$$

## 5. Ukuran Dewan Komisaris

### a. Pengertian Ukuran Dewan Komisaris

Menurut Undang-Undang POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dalam Agoes dan Agoes & Ardana, (2014) dewan komisaris adalah sebagai berikut:

“Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. KNKG (2016) mendefinisikan dewan komisaris adalah sebagai berikut: “Dewan komisaris adalah bagian dari organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG, Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional”.

Menurut Sembiring (2017) semakin besar jumlah anggota Dewan komisaris, semakin mudah untuk mengendalikan *Chief Executives Officer* (CEO) dan semakin efektif dalam memonitor aktivitas manajemen. Ukuran Dewan komisaris yang dimaksud disini adalah banyaknya jumlah anggota Dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Ukuran dewan komisaris menunjukkan besarnya jumlah anggota yang ada pada dewan. Jumlah anggota dewan atau ukuran dewan harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Dewan yang memiliki ukuran besar memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan direktur yang memiliki kompeten, artinya

ukuran dewan berdampak terhadap kualitas keputusan dan kebijakan yang dihasilkan dalam rangka mengefektifkan pencapaian tujuan organisasi.

Jumlah anggota dewan komisaris yang terlalu sedikit dimungkinkan akan membawa dampak terhadap kualitas keputusan yang rendah dan pengawasan terhadap pengambilan keputusan yang diambil komisaris juga akan rendah. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016, bank wajib memiliki anggota dewan komisaris dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi.

Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka semakin mudah pengendalian dan pengawas yang dilakukan untuk pengungkapan risiko yang semakin efektif dan luas. Saidah (2014) menjelaskan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan risiko perusahaan. Adanya pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan risiko perusahaan dikarenakan peran dewan komisaris yang sangat penting dalam pelaksanaan *good corporate governance* .

#### **b. Metode Pengukuran Ukuran Dewan Komisaris**

Ukuran Dewan Komisaris diukur dengan jumlah anggota dewan Komisaris, Dewan Komisaris adalah salah satu mekanisme yang banyak dipakai untuk memonitor manajer. Pengukuran Dewan Komisaris menurut (Pangestu, 2014) sebagai berikut:

Ukuran Dewan Komisaris = Jumlah Anggota Dewan Komisaris
---

## **6. Kepemilikan Manajerial**

### **a. Pengertian Kepemilikan Manajerial**

Pengertian kepemilikan manajerial Menurut Riyanto (2018), sebagai berikut: “Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham”. Menurut Gibson (2016) pengertian kepemilikan manajerial adalah: “Jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola.” Sedangkan menurut Agoes (2017), Kepemilikan manajerial: “Kepemilikan manajerial menunjukkan adanya peran ganda seorang manajer, yakni bertindak juga sebagai pemegang saham. Dari ketiga defnisi diatas dari Riyanto (2018), Gibson (2016) dan Agoes (2017) dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola.

Pendekatan keagenan menganggap stuktur kepemilikan manajerial sebagai suatu instrument atau alat yang digunakan untuk mengurangi konflik keagenan diantara beberapa klaim terhadap sebuah perusahaan. Meningkatkan kepemilikan manajerial digunakan sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah yang ada di perusahaan. Meningkatnya kepemilikan manajerial maka manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya sehingga dalam hal ini akan berdampak baik kepada perusahaan serta memenuhi keinginan para pemegang saham (Arifin, 2015).

## b. Metode Pengukuran Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial dihitung dengan menggunakan presentase saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan yang secara aktif ikut serta dalam pengambilan keputusan perusahaan (dewan komisaris dan direksi) pada akhir tahun. Pengukuran presentase ini untuk mengetahui besarnya manajerial memiliki saham perusahaan. Menurut Fahmi (2016) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial adalah “*the proportion of total shares by the member of directors*”. Maka kepemilikan manajerial dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah Saham dimiliki Manajemen}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100\%$$

Keterangan:

KM : Kepemilikan Manajerial

Rumus diatas berfungsi mengetahui presentase kepemilikan manajerial dengan membandingkan antara jumlah saham manajemen dengan jumlah saham yang beredar. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No../POJK.04/2013 tentang Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan Perusahaan Terbuka terkait hak karyawan perusahaan untuk memperoleh sampai sejumlah 10% dari saham yang ditawarkan. Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan, maka manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri.

Semakin besar kepemilikan saham oleh manajer maka akan semakin mengurangi perilaku oportunistik manajer untuk memaksimalkan kepentingan pribadi, dengan begitu manajer akan mengambil keputusan

sesuai dengan kepentingan perusahaan. Tingkat kepemilikan manajerial yang terlalu tinggi juga berdampak buruk terhadap perusahaan, dengan kepemilikan manajerial yang tinggi, manajer mempunyai hak voting yang tinggi sehingga manajer mempunyai posisi yang kuat untuk mengendalikan perusahaan, hal ini dapat menimbulkan adanya kesulitan bagi para pemegang saham eksternal untuk mengendalikan tindakan manajer (Fahmi, 2016).

## **7. Dewan Pengawas Syariah (DPS)**

### **b. Pengertian Pengawas Syariah (DPS)**

Dewan Pengawas Syariah ialah suatu badan yang mempunyai tugas untuk mengawasi jalannya operasional lembaga keuangan syariah supaya sesuai dengan ketentuan syariah yang sudah di fatwakan oleh DSN (Andri, 2019). Keberadaan Dewan Pengawas Syariah ini berada di bawah Rapat Umum Pemegang saham atau sepadan dengan pengurus dalam struktur suatu lembaga keuangan syariah, salah satunya pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Hal ini bertujuan untuk menjamin efektifitas Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas (Herry, 2013).

Dewan Pengawas Syariah lembaga keuangan berkewajiban mengarahkan dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan agar dapat diyakinkan bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam. Peran utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan ketentuan

syariah. Hal ini disebabkan transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibandingkan bank konvensional, karena itu diperlukan garis panduan yang dapat menjadi acuan perbankan syariah. Garis panduan (guidelines) ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional (Syafi'i, 2015).

Berdasarkan keterangan yang ada di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) ialah suatu badan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap segala aktivitas di dalam lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan syariah. Dewan Pengawas Syariah juga mempunyai tugas lain yaitu meneliti dan membuat usulan-usulan produk baru dari lembaga keuangan yang diawasinya. Dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah adalah orang paling awal yang melakukan penyaringan terhadap produk sebelum produk tersebut di aplikasikan dan di fatwakan pada Dewan Syariah Nasional.

### **c. Metode Pengukuran Pengawas Syariah (DPS)**

Menurut Undang-Undang pasal 20 ayat (2) dalam pelaksanaan fungsinya, Dewan Pengawas Syariah diwajibkan mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional. Dewan Pengawas Syariah dapat diukur dengan menggunakan jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah yang ada dalam suatu persahaan perbankan.

Pengukuran Dewan Pengawas Syariah, dalam penelitian ini menggunakan Jumlah Anggota DPS dihitung berdasarkan jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah dari masing-masing bank umum syariah di

Indonesia pada setiap akhir tahun (Nomran et al., 2018: 174–187).

Menggunakan rumus sebagai berikut:

**Jumlah Anggota DPS (SIZE) =  $\sum$  Anggota DPS pada setiap akhir tahun**

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan kecenderungan kecurangan akuntansi yang mendukung penelitian ini, antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Kaaroud et al., (2020) didapatkan hasil bahwa keahlian komite audit dan rapat komite audit secara signifikan terkait dengan luasnya *audit report lag*. Namun, independensi dewan, ukuran komite audit dan komite Syariah keahlian tidak secara signifikan terkait dengan tingkat *audit report lag*. Hasil studi ini mendukung harapan teori keagenan, karena dapat disimpulkan bahwa masalah keagenan (*audit report lag*) dapat dimitigasi dengan memiliki mayoritas anggota komite audit dengan keuangandan/atau latar belakang akuntansi, dan ini akan meningkatkan efektivitas fungsi komite audit atas proses keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Li (2014) didapatkan hasil bahwa semua perusahaan mengajukan laporan audit pengendalian internal mereka dalam batas waktu peraturan, dan sebagian besar perusahaan bersedia untuk mengungkapkan laporan audit pengendalian internal selama dua sampai empat bulan setelah akhir tahun fiskal. Meningkat jumlah perusahaan lebih memilih untuk mengungkapkan laporan audit pengendalian internal dalam waktu tiga sampai empat bulan setelah akhir tahun anggaran. Analisis regresi mengungkapkan bahwa perusahaan, dengan lebih sedikit direktur tetapi lebih

banyak pengawas dan anggota dalam komite audit serta rapat dewan pengawas yang lebih jarang, lebih mungkin untuk mengurangi IARL. Sebaliknya, penelitian ini juga menunjukkan faktor-faktor sebagai independensi dewan komisaris pengawas dan direksi, frekuensi rapat direksi secara bersama-sama dengan dualitas CEO, hampir tidak memberikan pengaruh pada IARL.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Faishal & (Hadiprajitno, 2015), didapatkan hasil bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap terhadap *audit report lag* perusahaan. Perusahaan dengan ukuran dewan komisaris yang tinggi akan memperpendek *audit report lag* perusahaan. Proporsi komisaris independen memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap *audit report lag* perusahaan. Perusahaan dengan proporsi komisaris independen yang tinggi akan memperpendek *audit report lag* perusahaan. Ukuran komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terhadap *audit report lag* perusahaan. Jumlah rapat komite audit memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap *audit report lag* perusahaan, Perusahaan dengan jumlah rapat komite audit yang lebih akan memperpendek *audit report lag* perusahaan.

Berdasarkan hasil penjelasan diatas, ebih lanjut peneliti dapat dilihat pada tabel 2 lebih rinci dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	(Kaaroud et al., 2020: 70–89)	The extent of <i>audit report lag</i> and governance mechanisms: Evidence from Islamic banking institutions in Malaysia	X1: Mekanisme pemerintahan X2: <i>Dewan Independen</i> X3: Ukuran Komite audit X4: Rapat Komite audit X5: Ukuran Bank Syariah Y: <i>Audit report lag</i>	keahlian komite audit dan rapat komite audit secara signifikan terkait dengan luasnya <i>audit report lag</i> . independensi dewan, ukuran komite audit dan komite Syariah keahlian tidak secara signifikan terkait dengan tingkat <i>audit report lag</i>
2.	(Li, 2014: 101–115)	The Influence of Corporation Governance Structure on Internal Control <i>Audit report lag</i> : Evidence From China	X1:Ukuran Dewan Direksi X2: Direksi Independen X3: Frekuensi Rapat X4: Dualitas CEO X5: Ukuran komite audit X6: Ukuran Dewan Pengawas X7: Independensi Dewan Pengawas X8: Frekuensi Pertemuan Y: <i>Audit report lag</i>	Semua perusahaan mengajukan laporan audit pengendalian internal mereka dalam batas waktu peraturan, dan sebagian besar perusahaan bersedia untuk mengungkapkan laporan audit pengendalian internal selama dua sampai empat bulan setelah akhir tahun fiskal. Meningkatkan jumlah perusahaan lebih memilih untuk mengungkapkan laporan audit pengendalian internal dalam waktu tiga sampai empat bulan setelah akhir tahun anggaran perusahaan, dengan lebih sedikit direktur tetapi lebih banyak pengawas dan anggota dalam komite audit serta rapat dewan pengawas yang lebih jarang, lebih mungkin untuk mengurangi IARL. Sebaliknya, penelitian ini juga menunjukkan faktor-faktor sebagai independensi dewan komisaris pengawas dan direksi, frekuensi rapat direksi secara bersama-sama dengan dualitas CEO, hampir tidak memberikan pengaruh pada IARL.
3.	(Apadore & Mohd Noor, 2013: 151–163)	Determinants of <i>Audit report lag</i> and Corporate Governance in Malaysia	X1:Independen komite audit X2:Rapat komite X3: keahlian komite audit X4: ukuran komite	Hasil dari ini studi menunjukkan bahwa tidak ada hubungan signifikan yang ditemukan antara investasi audit internal dan audit melaporkan lag meskipun penelitian telah memperoleh tanda

No.	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
			audit X5: dewan independen X6: Investasi Audit X7: Kosentrasi Kepemilikan Y: <i>Audit report lag</i>	pengecualian. Dimana, menunjukkan bahwa audit internal tidak tidak dimaksudkan untuk mengurangi beban auditor eksternal dan juga tidak mempersingkat <i>audit report lag</i> . Singkatnya, hasilnya konsisten dengan H4, H7, H8 dan H9 tetapi H1, H2, H3, H5 dan H10 tidak didukung.
4.	(Raweh, 2019: 152)	Audit Committee Characteristics and <i>Audit report lag</i> : Evidence From Oman	X1: Ukuran Komite audit X2: Independen komite audit X3: keahlian komite audit X4: rapat komite audit Y: <i>Audit report lag</i>	<i>Audit report lag</i> dipengaruhi oleh karakteristik komite audit yaitu ukuran, kemandirian, keahlian keuangan dan pertemuan di pengaturan Oman. Adanya hubungan positif yang signifikan antara ukuran komite audit dengan laporan audit lag, menunjukkan bahwa ukuran komite audit yang kecil dikaitkan dalam mengurangi lag laporan audit.
5.	(Abernathy et al., 2016: 100–127)	An International Perspective on <i>Audit report lag</i> : A Synthesis of the Literature and Opportunitis for Future Raesearch	X1: Ukuran Perusahaan X2: Kinerja dan kondisi Keuangan X3: Kompleksitas dan industri X4: Pengendalian internal atas pelaporan keuangan Y: <i>Audit report lag</i>	ARL tampaknya lebih pendek untuk perusahaan yang lebih besar dan lebih sukses dan untuk perusahaan dengan ketentuan tata kelola perusahaan yang lebih kuat. Sebaliknya, perusahaan dengan karakteristik risiko yang dapat diidentifikasi seperti kinerja keuangan yang buruk, risiko industri, dan mengidentifikasi kelemahan pengendalian internal lebih sering mengalami ARL lebih lama.
6.	(Faishal & Hadiprajit no, 2015: 239–249)	Pengaruh Mekanisme <i>Good corporate governance</i> Terhadap <i>Audit report lag</i>	X1: Ukuran dewan komisaris X2: ukuran dewan komisaris X3: Proporsi komisaris independen X4: komisaris independen X5: Ukuran komite audit X6: Jumlah rapat	Ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap terhadap <i>audit report lag</i> perusahaan. Perusahaan dengan ukuran dewan komisaris yang tinggi akan memperpendek <i>audit report lag</i> perusahaan. Proporsi komisaris independen memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap <i>audit report lag</i> perusahaan. Perusahaan dengan proporsi komisaris independen

No.	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
			komite audit Y: <i>Audit delay</i>	yang tinggi akan memperpendek <i>audit report lag</i> perusahaan. Ukuran komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>audit report lag</i> perusahaan. Jumlah rapat komite audit memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap <i>audit report lag</i> perusahaan
7.	(Kusumah & Manurung, 2017: 137–148)	Pentingkah <i>Good corporate governance</i> bagi <i>Audit report lag</i> ?	X1: Ukuran Komite audit X2: Independen Komite audit X3: Rapat Komite audit X4: Ukuran Dewan X5: Komisaris Independen Y: <i>Audit delay</i> Z1: Ukuran Perusahaan Z2: Reputasi KAP	Komite audit tidak berpengaruh negatif terhadap <i>audit report lag</i> . dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap <i>audit report lag</i> . ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh negatif terhadap <i>audit report lag</i> . variabel kontrol ukuran perusahaan dan KAP Big 4 tidak berpengaruh negatif terhadap <i>audit report lag</i> .
8.	(Putu & Swami, 2013: 530–549)	Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap <i>Audit report lag</i>	X1: Kepemilikan manajerial X2: Dewan komisaris independen X3: Kepemilikan institusional X4: Keberadaan komite audit Y: <i>audit report lag</i>	Kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap <i>audit report lag</i> . Dewan Komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>audit report lag</i> . Kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>audit report lag</i> . Keberadaan komite audit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap <i>audit report lag</i> . Variabel kontrol ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>audit report lag</i> . Variabel kontrol reputasi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>audit report lag</i> .
9.	(Wardhani & Raharja,	Analisis Pengaruh Corporate	X1: Ukuran Komite X2: Independensi Komite audit	1. Jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh yang signifikan terhadap <i>audit report</i>

No.	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
	2013: 766–778)	Governance Terhadap <i>Audit report lag</i>	X3: Rapat Komite audit X4 : Kompetensi Anggota Komite audit X5: Ukuran Dewan X6 : Komisaris Independen Y: <i>audit report lag</i>	<p><i>lag</i> dengan arah negatif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Independensi komite audit berpengaruh signifikan terhadap <i>audit report lag</i> dengan arah negatif</li> <li>3. Rapat komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>audit report lag</i> dengan arah negative</li> <li>4. Kompetensi anggota komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap <i>audit report lag</i> dengan arah negatif.</li> <li>5. Ukuran dewan berpengaruh secara signifikan terhadap <i>audit report lag</i> dengan arah positif</li> <li>6. Komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>audit report lag</i> dengan arah negatif.</li> </ol>
10.	Utami et al., (2018: 136–148)	Pengaruh Opini Audit, Ukuran KAP, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Perusahaan Terhadap <i>Audit delay</i> Pada Perusahaan Manufaktur Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017	X1: Opini Audit X2: Ukuran KAP X3: Ukuran Perusahaan Internal X4 : Profitabilitas Y: <i>Audit delay</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>audit delay</i></li> <li>2. Ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>audit delay</i></li> <li>3. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i></li> <li>4. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i></li> </ol>

## C. Hubungan Antar Variabel dan Hipotesis

### 1. Pengaruh Komite audit Terhadap *Audit delay*

Menurut POJK NOMOR 55/POJK.04/2015 pasal 4, Komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Peran penting komite audit dalam mengurangi *audit report lag* ialah memperkuat komunikasi auditor eksternal dan manajemen, memengaruhi risiko kontrol, risiko audit, jam audit dan pengujian substantif, dan membuat laporan keuangan yang baik. Komite audit yang independen dapat meningkatkan internal control dan proses pengawasan dari laporan keuangan perusahaan. Dengan kompetensi yang dimiliki anggota komite, fungsi dan peran dari Komite audit lebih bisa berjalan efektif dan mempermudah proses audit dari auditor independen.

Semakin banyak anggota dalam Komite audit suatu perusahaan maka semakin singkat *Audit delay* (Darmawan, 2017), karena dengan semakin banyaknya anggota dalam Komite audit maka manajer akan lebih terawasi dalam melakukan proses pelaporan akuntansi dan keuangan, sehingga auditor akan melakukan proses audit dengan lebih baik dan tepat waktu. Penelitian yang dilakukan Robert Jao, 2018 didapatkan hasil bahwa rapat komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap *audit delay*. Hasil ini sesuai dengan penelitian Haryani & Wiratmaja (2014) dan Purba (2018) yang membuktikan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *Audit delay*. Penelitian yang dilakukan Muhammad & Henri (2021) didapatkan

hasil bahwa Komite audit berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *audit delay*.

### **H1: Komite audit Berpengaruh Negatif Terhadap *Audit delay***

## **2. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap *Audit delay***

Menurut Peraturan OJK Nomor 33 /POJK.04/2014, Dewan Komisaris ialah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang memiliki tugas untuk mengawasi baik secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Menurut teori agensi pengawasan dari dewan komisaris independen dapat membantu mengurangi adanya asimetri informasi yang dilakukan oleh manajemen sehingga luas dan waktu pengerjaan audit dapat berkurang (Swami & Latrini, 2013). Dewan komisaris independen meminta auditor untuk melaporkan laporan keuangan lebih tepat waktu sehingga informasi laporan keuangan menjadi lebih berkualitas dan dapat mengurangi *audit report lag*.

Penelitian yang dilakukan oleh Robert Jao (2018: 11–12) Ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap *audit delay*. Semakin banyak dewan komisaris akan mendorong anggota yang berfokus terhadap masing-masing departemen. Dewan komisaris akan memantau dan berkoordinasi dengan manajemen untuk menjalankan tugasnya dengan lebih efektif. Dewan komisaris mendorong auditor independen untuk mempercepat penyelesaian audit agar nilai dari informasi tersebut tidak berkurang. Banyaknya dewan komisaris mengindikasikan bahwa semakin efektif pengawasan terhadap perusahaan, sehingga laporan yang disajikan juga semakin transparan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh Raditya (2015) serta Faishal & Hadiprajitno (2015) yang menemukan ukuran dewan komisaris mempunyai pengaruh negatif terhadap *audit delay*. Penelitian Putu & Swami (2013) Dewan Komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit report lag*

**H2: Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh Negatif Terhadap *Audit delay***

**3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap *Audit delay***

Menurut *Agency Theory*, Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak melalui satu atau lebih pemilik (*principal*) yang menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa atas nama pemilik dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Struktur kepemilikan merupakan berbagai macam pola dan bentuk dari kepemilikan suatu perusahaan atau persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham internal dan pemegang saham eksternal, dan konflik dalam teori ini adalah *agency cost*.

Menurut Bernandhi (2017) kepemilikan manajerial adalah tingkat kepemilikan saham oleh pihak manajemen yang secara aktif terlibat di dalam pengambilan keputusan. Asimetri informasi dapat memicu adanya masalah keagenan, karena manajemen mempunyai informasi mengenai kondisi perusahaan yang lebih lengkap dibandingkan pemegang saham. Teori agensi berfungsi untuk menganalisa dan menemukan solusi terhadap masalah yang ada dalam hubungan keagenan antara manajemen (*agen*) dan pemegang saham (*principal*). Salah satu hal yang dapat meminimalkan

konflik keagenan adalah dengan adanya kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial dapat mensetarakan kepentingan pemegang saham dengan kepentingan manajemen perusahaan, karena manajemen mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri (Putri & Syahrial, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Putri et al., (2021) tidak dapat membuktikan hal tersebut karena ada atau tidaknya kepemilikan manajerial tidak dapat mempengaruhi panjangnya audit report lag. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan tidak mampu meningkatkan pengawasan yang baik oleh pihak manajemen sehingga tidak dapat menurunkan terjadinya audit report lag. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Swami & Latrini (2013) dan Putri & Syahrial (2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap audit report lag. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis berikut:

**H3: Kepemilikan Manajerial Berpengaruh Negatif Terhadap *Audit delay***

#### **4. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap *Audit delay***

Dewan Pengawas Syariah lembaga keuangan berkewajiban mengarahkan dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan agar dapat diyakinkan bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam. Peran utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan ketentuan syariah. Hal ini disebabkan transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank

syariah sangat khusus jika dibandingkan bank konvensional, karena itu diperlukan garis panduan yang dapat menjadi acuan perbankan syariah.

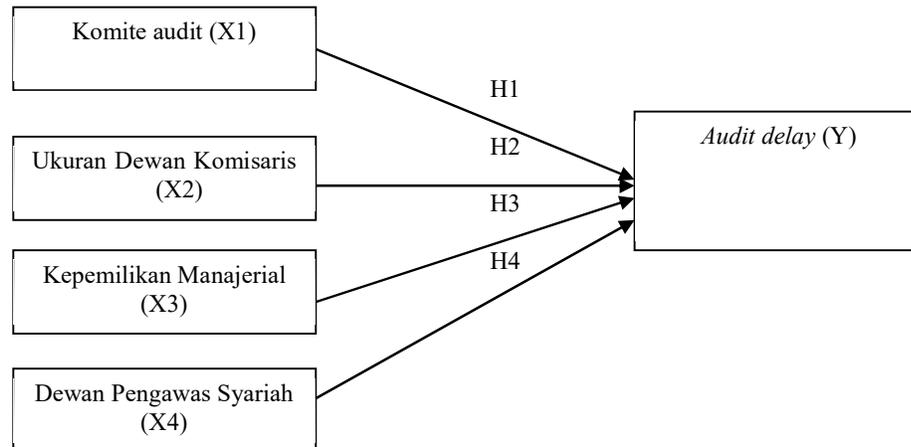
Kepatuhan terhadap prinsip Syariah merupakan aspek utama dan mendasar bagi perbankan syariah. Peran DPS lebih dibutuhkan oleh perbankan syariah dikarenakan DPS yang berperan untuk memastikan dan mengawasi pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh Bank Syariah. Jika semakin banyak jumlah DPS suatu perusahaan maka semakin singkat *Audit delay*. Begitu sebaliknya, jika semakin sedikit jumlah anggota DPS maka semakin lama *Audit delay*.

Penelitian yang dilakukan oleh Li (2014) didapatkan hasil bahwa Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negative dan signifikan Terhadap *Audit delay*. Penelitian yang dilakukan oleh Fadillah (2017) Dewan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay*. komisaris independen dalam perusahaan dinilai belum mampu memberikan dampak yang baik terutama dalam tugasnya untuk melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap manajer perusahaan sehingga para pelaku pasar belum sepenuhnya mempercayai kinerja komisaris independen dalam perusahaan.

**H4: Dewan Pengawas Syariah Negatif Terhadap *Audit delay***

## D. Kerangka Konseptual

**Gambar 1**  
**Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial,**  
**Komite audit Terhadap *Audit delay***



## E. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penelitian maka hipotesis penelitian ini adalah:

1. Komite audit berpengaruh Negatif terhadap *audit delay*
2. Ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *audit delay*
3. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *audit delay*
4. Dewan Pengawas Syariah Negatif Terhadap *Audit delay*

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Desain dan Jenis Penelitian**

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini maka desain penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut Sekaran (2017) adalah metode ilmiah yang datanya berbentuk angka atau bilangan yang dapat diolah dan di analisis dengan menggunakan perhitungan matematika atau statistika.

Tujuan dari penelitian kuantitatif ialah untuk mendapatkan penjelasan dari sebuah teori dan hukum-hukum realitas. Penelitian Kuantitatif seringkali di pakai untuk melihat bukti dan menampik suatu teori. Karena penelitian ini kemudian di bahas dan diambil kesimpulan. Dalam hal ini peneliti ingin meneliti mengenai Pengaruh Karakteristik *Good corporate governance* (GCG) yang terdiri dari ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial, komite audit terhadap *Audit delay*.

Dalam penelitian ini yang berjudul Pengaruh Karakteristik *Good corporate governance* (GCG) yang terdiri dari ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial, komite audit dan dewan pengawas syariah terhadap *Audit delay* peneliti menggunakan data panel. Karena laporan keuangan yang digunakan merupakan laporan keuangan tahunan milik 12 Bank Umum Syariah di Indonesia dengan kurun waktu lima tahun terakhir yang telah diaudit. Mengambil data lima tahun terakhir karena data akan lebih akurat dan akan lebih mudah dilihat bagaimana fluktuasi dalam setiap tahunnya.

## **B. Populasi dan Sampel**

### **1. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian, atau keseluruhan unit maupun individu dalam ruang lingkup yang diteliti (Sekaran, 2017). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan populasi seluruh data laporan keuangan tahunan milik empat belas Bank Umum Syariah di Indonesia yang telah diaudit oleh auditor independen periode tahun 2016-2020.

### **2. Sampel**

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi atau sebagian populasi yang menjadi subyek penelitian yang dapat mewakili populasi penelitian (Arikunto, 2017). Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan *nonprobability* yaitu metode *purposive sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan suatu pertimbangan/kriteria tertentu sesuai dengan yang dikehendaki peneliti (Sugiono, 2017)

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dimana peneliti memilih sampel yang memiliki kriteria sesuai dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah (BUS) selama 5 tahun, yaitu sebanyak 60 laporan keuangan. Kriteria sampling pada penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang menerbitkan laporan keuangan dan

highlight tata kelola perusahaan secara lengkap dan konsisten selama tahun 2016-2020. Sedangkan untuk kriteria pengambilan sampel penelitian dapat dilihat pada tabel 3.

**Tabel 3. Kriteria Pengambilan Sampel**

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah Bank Umum Syariah di Indonesia	14
2	Bank Umum Syariah yang tidak menerbitkan highlight tata kelola perusahaan secara lengkap selama tahun 2016-2020	3
3	Bank Umum Syariah yang telah memenuhi kriteria dari sampel	11

Berdasarkan tabel diatas dengan teknik *purposive sampling* di dapatkan jumlah sampel 11 Bank Umum Syariah dengan periode 2016-2020. Dengan adanya hal tersebut, maka diperoleh sampel penelitian sebanyak 55 sampel yang berupa laporan keuangan tahunan dari masing masing Bank Umum Syariah tersebut. Sedangkan daftar sampel penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.

**Tabel 4. Sampel Penelitian**

No	Nama Bank	Sumber Data
1	BRI Syariah	<a href="http://www.brisyariah.co.id">www.brisyariah.co.id</a>
2	BNI Syariah	<a href="http://www.bnisyariah.co.id">www.bnisyariah.co.id</a>
3	Bank Syariah Mandiri	<a href="http://www.syariahmandiri.co.id">www.syariahmandiri.co.id</a>
4	Bank Muamalat	<a href="http://www.bankmuamalat.co.id">www.bankmuamalat.co.id</a>
5	Bank Panin Dubay Syariah	<a href="http://www.paninbanksyariah.co.id">www.paninbanksyariah.co.id</a>
6	Bank Mega Syariah	<a href="http://www.megasyariah.co.id">www.megasyariah.co.id</a>
7	Bank BTPN Syariah	<a href="http://www.btpnsyariah.co.id">www.btpnsyariah.co.id</a>
8	Bank Bukopin Syariah	<a href="http://www.syariahbukopin.co.id">www.syariahbukopin.co.id</a>
9	Bank Jabar Banten Syariah	<a href="http://www.bjbsyariah.co.id">www.bjbsyariah.co.id</a>
10	Bank Victoria Syariah	<a href="http://www.bankvictoriasyariah.co.id">www.bankvictoriasyariah.co.id</a>
11	BCA Syariah	<a href="http://www.bcasyariah.co.id">www.bcasyariah.co.id</a>

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian sangat berpengaruh dalam melakukan analisis data penelitian nantinya. Sedangkan sumber data merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data adalah subjek penelitian tempat data menempel. Sumber data berupa benda gerak, manusia, tempat, dan sebagainya (Sugiono, 2017). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data menggunakan data sekunder, karena data yang diperlukan merupakan laporan keuangan tahunan. Sehingga peneliti menggunakan data tidak langsung atau tidak dari nasabah ataupun pegawai bank, melainkan dari laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dari dua belas Bank umum Syariah dan bersumber dari situs atau website Bank Umum Syariah tersebut.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini cara peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan pengumpulan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, surat-surat, gambar, kenang-kenangan, laporan dan sebagainya. Sifat utama dari data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga dapat memberi peluang kepada para peneliti untuk hal-hal

pada masa silam (Sugiono, 2017). Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk menyimpulkan dan mendokumentasikan laporan keuangan tahunan yang terdapat pada Bank Umum Syariah untuk mengetahui ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial, komite audit dan *audit delay*.

## E. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis variabel yakni variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependent variable*). Variabel terikat adalah variabel yang menjadi perhatian utama peneliti sedangkan variabel bebas adalah variabel yang akan memengaruhi variabel terikat secara positif ataupun negatif (Rasibo, 2015). Adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial, komite audit. Sedangkan variabel terikatnya adalah *audit delay*.

## F. Model dan Metode Analisis Data

### 1. Model Analisis

Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. variabel bebas (*independen variable*) dalam penelitian ini adalah Dewan Komisaris (X1), Kepemilikan Manajerial (X2), Komite audit (X3) dan Dewan Pengawas Syariah (X4) terhadap variabel terikat (*dependen variable*) yaitu *Audit delay* (Y). Dan persamaan regresinya dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y	: <i>Audit delay</i>
a	: Konstanta
x <sub>1</sub>	: Komite audit
x <sub>2</sub>	: Ukuran Dewan Komisaris
x <sub>3</sub>	: Kepemilikan Manajerial
x <sub>4</sub>	: Dewan Pengawas Syariah
b <sub>1,2,3</sub>	: Koefisien regresi
e	: Variabel yang tidak diteliti

## 2. Metode Analisis

### a. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini digunakan untuk mengetahui apakah model regresi tersebut benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif maka model dari uji asumsi klasik tersebut harus memenuhi asumsi klasik regresi (Ghozali, 2013).

#### 1) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau berdistribusi normal (Ghozali, 2013). Seperti diketahui bahwa Uji T dan F diasumsikan untuk mengetahui nilai residual mengikuti distribusi yang normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik maka tidak akan valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua teknik untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yakni dengan analisis grafik atau uji statistik (Ghozali, 2013).

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yakni dengan cara melihat *normal*

*probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal.

Normalitas bisa dideteksi dengan cara melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Jika data (titik) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka menunjukkan pola distribusi normal yang mengindikasikan bahwa regresi memenuhi asumsi normal. Uji Statistik yang digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji *statistic non-parametrik Kolmogrov-Smirnov (K-S)* Artinya jika nilai *Kolmogrov-Smirnov*  $> 0,05$  maka data penelitian berdistribusi normal.

## 2) Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2013). Namun jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel tidak akan orthogonal. Variabel ortogonal ialah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolonieritas didalam model regresi maka dilakukan cara-cara berikut untuk mengetahuinya :

- a) Nilai R square (R<sup>2</sup>) yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris yang sangat tinggi, tetapi secara individual tidak terikat

b) Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang lumayan tinggi (lebih dari 0,09), maka terdapat indikasi multikolonieritas

c) Melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF), suatu model regresi yang bebas dari masalah multikolonieritas apabila mempunyai nilai *tolerance*  $> 0,1$  dan nilai VIF  $< 10$ .

### 3) Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas berarti variasi (*varians*) variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Untuk mengatasi adanya varians yang berbeda (*heteroskedastisitas*) dalam satu variabel pengganggu ( $e_i$ ) dapat dilihat dari pendekatan glesjer (Idris, 2014). Menurut Ghazali, (2013:99) pengambilan keputusan pada uji heteroskedastisitas :

1. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi kasus heteroskedastisitas
2. Jika nilai signifikansi kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan terjadi kasus heteroskedastisitas.

### 4) Uji Autokorelasi

Untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi tersebut terjadi autokorelasi atau tidak, diperlukan uji autokorelasi yang bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  sebelumnya (Ghozali, 2016). Jika terjadi korelasi, dapat dikatakan terdapat problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena penelitian yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Untuk menguji autokorelasi antara lain dapat dilakukan Uji Durbin-

Watson. Uji Durbin-Watson digunakan sebab hanya untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi di antara variabel bebas (Gujarati, 2010). Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

**Tabel 5. Penilaian DW (Durbin-Watson)**

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autikorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autikorelasi positif	Ragu-ragu	$dl < d < du$
Tidak ada autikorelasi negative	Tolak	$4-dl < d < 4$
Tidak ada autikorelasi negative	Ragu-ragu	$4-du < d < 4-dl$
Tidak ada autikorelasi positif atau negative	Tidak ditolak	$du < d < 4-du$

Sumber : Ghozali, (2013)

### **b. Uji Hipotesis**

#### 1) Uji t

Uji t dipakai untuk menguji seberapa jauhnya pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian secara individual dalam menjelaskan dan menerangkan variabel dependen secara parsial (Ghozali, 2016).

Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian ini menurut Ghozali (2016) adalah jika  $p\ value < 0,05$  maka Hipotesis diterima. Sebaliknya, jika  $p\ value \geq 0,05$  maka Hipotesis ditolak.

#### a) Menentukan Tingkat Signifikan

Tingkat signifikan pada penelitian ini adalah 5% dimana dapat di ketahui dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

- 1) Jika angka signifikan (sig)  $< 0,05$  maka kedua variabel mempunyai hubungan yang signifikan.

2) Jika angka signifikan ( $\text{sig}$ )  $> 0,05$  maka kedua variabel tidak mempunyai hubungan yang signifikan.

b) Pengambilan Keputusan

a. Jika  $T \text{ hitung} < T \text{ tabel}$ , maka  $H_0$  diterima  $H_1$  ditolak

b. Jika  $T \text{ hitung} > T \text{ tabel}$  maka  $H_0$  ditolak  $H_1$  diterima

2) Uji F

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat (Ghozali, 2016).

Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian yang menggunakan p value atau F hitung adalah jika  $p \text{ value} < 0,05$  atau  $F \text{ hitung} \geq F \text{ tabel}$  maka Hipotesis diterima. Sebaliknya, jika  $p \text{ value} \geq 0,05$  atau  $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$  maka Hipotesis ditolak (Ghozali, 2016).

1) Menentukan Tingkat Signifikan

Tingkat signifikan pada penelitian ini adalah 5% ( $\alpha=0,05$ ), dimana nilai  $df_1$  diperoleh dari jumlah variabel 1 dan  $df_2$  dari  $n-k-1$  dimana  $n$  adalah jumlah kasus dan  $k$  adalah jumlah variabel dependen.

2) Pengambilan Keputusan

a) Jika  $F \text{ hitung} < F\text{-tabel}$ , maka  $H_0$  diterima  $H_1$  ditolak

b) Jika  $F \text{ hitung} \geq F \text{ tabel}$  maka  $H_0$  ditolak  $H_1$  diterima

### 3) Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah alat yang digunakan mengukur sejauhmana kemampuan model dalam menjelaskan variasi terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai  $R^2$  yang kecil dapat diartikan bahwa variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Dan sebaliknya jika nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen (Ghozali, 2016).

## G. Defenisi Operasional

Berikut ini ringkasan dari variabel penelitian dan pengukuran yang akan digunakan dalam penelitian ini.

### 1. Variabel Dependen

*Audit delay* merupakan jeda waktu yang dibutuhkan auditor dalam menyelesaikan tugasnya, yaitu diukur dari tanggal tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan auditor independen. Lamanya proses penyelesaian audit akan berdampak pada reaksi investor maupun masyarakat umum. Sehingga akan berakibat pada ketidakpastian dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi para pemakai laporan keuangan (Novit, 2016).

*Audit delay* diukur secara kuantitatif yaitu jumlah hari yang dihitung dari tanggal penutupan tahun buku hingga diterbitkannya laporan auditor independen. Variabel ini diukur dengan rumus (Saputri, 2016):

$$\text{Audit delay} = \text{Tanggal Laporan Audit} - \text{Tanggal Laporan Keuangan}$$

## 2. Variabel Independen

### a. Komite audit

Komite audit ini merupakan orang yang melakukan pengawasan terhadap perusahaan. Adanya komite audit diharapkan mampu mengontrol dan memonitor keputusan yang dilakukan manajer itu sudah benar yang berarti bahwa keputusan tidak memihak suatu pihak, namun mengikat semua pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan (Thesarani, 2016).

Menurut Sarafina dan Saifi (2017), untuk menghitung proporsi komite audit dalam perusahaan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Komite Audit} = \text{Total Komite Audit}$$

### b. Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah bagian dari organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG (KNKG, 2016). Ukuran Dewan Komisaris diukur dengan jumlah anggota dewan Komisaris, Dewan Komisaris adalah salah satu mekanisme yang banyak dipakai untuk memonitor manajer. Pengukuran Dewan Komisaris menurut Sihotang (2017) sebagai berikut:

$\text{Ukuran Dewan Komisaris} = \text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}$
---

### c. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham (Tjeleni, 2013). Menurut Asmiran (2013) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial adalah “*the proportion of total shares by the member of directors*”. Maka kepemilikan manajerial dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah Saham dimiliki Manajemen}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100\%$$

### d. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah ialah suatu badan yang mempunyai tugas untuk mengawasi jalannya operasional lembaga keuangan syariah supaya sesuai dengan ketentuan syariah yang sudah di fatwakan oleh DSN (Andri, 2019). Dewan Pengawas Syariah dirangkai dalam suatu indeks. Indeks ini dinamakan *Islamic Governance Score* (IG-Score). Perhitungan IG-Score didasarkan pada jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah, kualifikasi pendidikan Dewan Pengawas Syariah, keterpandangan anggota Dewan Pengawas Syariah Azizah & Erinosa (2020). Pengukuran Dewan Pengawas Syariah, dalam penelitian ini menggunakan Jumlah Anggota DPS dihitung berdasarkan jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah dari masing-masing bank umum syariah di Indonesia pada setiap akhir tahun (Nomran et al., 2018: 174–187). Menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Anggota DPS (SIZE)} = \sum \text{Anggota DPS pada setiap akhir tahun}$$

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum BEI dan Perusahaan Sektor Keuangan

#### 1. Gambaran Umum Bursa Efek Indonesia (BEI)

Bursa efek adalah sebuah sistem yang terorganisir dengan mekanisme resmi yang bertujuan untuk mempertemukan penjual dan pembeli sekuritas secara langsung atau melalui wakil-wakilnya. Bursa Efek Indonesia adalah salah satu bursa saham yang dapat memberikan peluang investasi dan sumber pembiayaan dalam upaya mendukung pembangunan ekonomi nasional. Bursa Efek Indonesia (BEI) atau yang sering disebut *Indonesia Stock Exchange (IDX)* berawal dari didirikannya Bursa Efek di Batavia pada tanggal 14 Desember 1912 oleh pemerintah Kolonial Belanda. Tujuan awal didirikannya Bursa Efek ini yaitu untuk menghimpun dana guna kepentingan sektor perkebunan yang ada di Indonesia. Adapun sekuritas yang diperdagangkan adalah saham dan obligasi perusahaan-perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia. Pertumbuhan dan perkembangan Bursa Efek ini tidak berjalan seperti yang diharapkan, dalam beberapa periode sempat ditutup akibat terjadi perang dunia ke I dan II, kemudian dibuka kembali pada tahun 1925. Pemerintah Kolonial Belanda juga mengoperasikan bursa paralel di Surabaya dan Semarang, namun kedua bursa ini dihentikan karena terjadi gejolak politik di Eropa awal tahun 1939.

Pasar modal di Indonesia kembali beroperasi dengan dibukanya Bursa Efek Indonesia di Jakarta pada tanggal 3 Juni 1952. Pembukaan ini didorong penerbitan obligasi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1950. Aktivitas

Bursa Efek ini mulai berkembang sampai tahun 1958 sebelum akhirnya diberhentikan karena adanya inflasi dan resesi ekonomi. Kemudian Bursa Efek tersebut dibuka kembali pada tahun 1977 dan ditandatangani oleh Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM). Kebangkitan ini didukung dengan diresmikannya aktivitas perdagangan di Bursa Efek Jakarta oleh Presiden Soeharto.

Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) kemudian bergabung dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2007. Penggabungan kedua bursa ini diharapkan dapat menciptakan kondisi perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Bursa Efek Indonesia berpusat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Kawasan Niaga Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia diklasifikasikan kedalam 9 sektor diantaranya yaitu:

- 1) Sektor Pertanian
- 2) Sektor Pertambangan
- 3) Sektor Industri Dasar dan Kimia
- 4) Sektor Aneka Industri
- 5) Sektor industri Barang Konsumsi
- 6) Sektor Properti, *Real Estate* dan Konstruksi Bangunan
- 7) Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi
- 8) Sektor Keuangan
- 9) Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi.

## 2. Gambaran Umum Perusahaan Sektor Keuangan

Perusahaan sektor keuangan merupakan satu dari empat sektor perusahaan jasa selain sektor properti dan *real estate*, sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi, serta sektor perdagangan, jasa, dan investasi. Perusahaan sektor keuangan adalah suatu perusahaan yang memberikan pelayanan jasa keuangan kepada konsumen, pelaku bisnis, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya yang dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Sektor keuangan memiliki berbagai jenis sub sektor yang terdiri dari perbankan, institusi keuangan, perusahaan sekuritas, dan asuransi.

Sektor keuangan merupakan darah dari ekonomi karena pusat tempat arus uang berputar. Sektor ini berisiko besar terhadap krisis terutama sektor perbankan. Banyak bank dan lembaga keuangan yang bangkrut ketika terjadi krisis. Namun sebaliknya, ketika ekonomi menggeliat sektor ini mendapatkan keuntungan yang baik (sucofindo.co.id). Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia yang berada di sektor keuangan yang memiliki peran sebagai perantara keuangan dari dua belah pihak, dimana pihak yang berlebih dana dengan pihak yang kekurangan dana.

### B. Analisis Deskriptif

#### 1. Analisis Deskriptif

##### a. *Audit delay* pada Perusahaan Sektor Keuangan Tahun 2016-2020

*Audit delay* merupakan jeda waktu yang dibutuhkan auditor dalam menyelesaikan tugasnya, yaitu diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan auditor independen. Lamanya

proses penyelesaian audit akan berdampak pada reaksi investor maupun masyarakat umum. Sehingga akan berakibat pada ketidakpastian dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi para pemakai laporan keuangan (Novit, 2016). *Audit delay* diukur secara kuantitatif yaitu tanggal laporan audit dikurang tahun laporan keuangan. Variabel ini diukur dengan rumus (Saputri, 2016):

Berikut ini merupakan contoh perhitungan *Audit delay* pada Bank BRI Syariah tahun 2016-2020 yang terdapat pada tabel 4.1

**Table 6. Perhitungan *Audit delay* Bank BRI Syariah tahun 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Tanggal Laporan Audit</b>	<b>Tanggal Laporan Keuangan</b>	<b><i>Audit report lag</i> (hari)</b>
2016	17/02/2017	31/12/2016	48
2017	09/02/2018	31/12/2017	40
2018	25/03/2019	31/12/2018	84
2019	03/02/2020	31/12/2019	34
2020	26/01/2021	31/12/2020	26

*Sumber : data diolah tahun 2022*

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, menunjukkan bahwa *Audit delay* Bank BRI Syariah tahun 2016-2020 berjumlah 48 hari pada tahun 2017, tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 40 hari, tahun 2019 jauh mengalami peningkatan 84 hari, tahun 2020 menurun 34 hari, sedangkan di tahun 2021 terus menurun menjadi 26 hari. Berikut ini data *Audit delay* perusahaan sektor Keuangan Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

Table 7. Data *Audit delay* tahun 2016-2020

<b>Nama Bank</b>	<b>Tahun</b>	<b>Tanggal Laporan Audit</b>	<b>Tanggal Laporan Keuangan</b>	<b><i>Audit delay</i></b>
BRI Syariah	2016	2/17/2017	12/31/2016	48
	2017	2/9/2018	12/31/2017	40
	2018	3/25/2019	12/31/2018	84
	2019	2/3/2020	12/31/2019	34
	2020	1/26/2021	12/31/2020	26
BNI Syariah	2016	1/30/2017	12/31/2016	30
	2017	2/14/2018	12/31/2017	45
	2018	2/1/2019	12/31/2018	32
	2019	2/3/2020	12/31/2019	34
	2020	1/18/2021	12/31/2020	18
Bank Syariah Mandiri	2016	1/30/2017	12/31/2016	30
	2017	1/18/2018	12/31/2017	18
	2018	1/18/2019	12/31/2018	18
	2019	1/18/2020	12/31/2019	18
	2020	1/18/2021	12/31/2020	18
Bank Muamalat	2016	2/17/2017	12/31/2016	48
	2017	3/16/2018	12/31/2017	75
	2018	3/8/2019	12/31/2018	67
	2019	1/24/2020	12/31/2019	24
	2020	3/31/2021	12/31/2020	90
Bank Panin Dubai Syariah	2016	2/17/2017	12/31/2016	48
	2017	2/28/2018	12/31/2017	59
	2018	2/25/2019	12/31/2018	56
	2019	2/25/2020	12/31/2019	56
	2020	3/29/2021	12/31/2020	88
Bank Mega Syariah	2016	3/24/2017	12/31/2016	83
	2017	3/26/2018	12/31/2017	85
	2018	2/20/2019	12/31/2018	51
	2019	3/4/2020	12/31/2019	64
	2020	2/22/2021	12/31/2020	53
Bank BTPN Syariah	2016	2/8/2017	12/31/2016	39
	2017	1/24/2018	12/31/2017	24
	2018	1/22/2019	12/31/2018	22
	2019	3/5/2020	12/31/2019	65
	2020	2/10/2021	12/31/2020	41
Bank Bukopin Syariah	2016	2/24/2017	12/31/2016	55
	2017	3/23/2018	12/31/2017	82

<b>Nama Bank</b>	<b>Tahun</b>	<b>Tanggal Laporan Audit</b>	<b>Tanggal Laporan Keuangan</b>	<b>Audit delay</b>
	2018	3/4/2019	12/31/2018	63
	2019	2/20/2020	12/31/2019	51
	2020	4/19/2021	12/31/2020	109
Bank Jabar Bantessn Syariah	2016	1/27/2017	12/31/2016	27
	2017	1/17/2018	12/31/2017	17
	2018	1/25/2019	12/31/2018	25
	2019	2/7/2020	12/31/2019	38
	2020	2/26/2021	12/31/2020	57
Bank Victoria Syariah	2016	2/9/2017	12/31/2016	40
	2017	3/5/2018	12/31/2017	64
	2018	2/22/2019	12/31/2018	53
	2019	2/26/2020	12/31/2019	57
	2020	4/30/2021	12/31/2020	120
BCA Syariah	2016	1/6/2017	12/31/2016	6
	2017	1/18/2018	12/31/2017	18
	2018	1/25/2019	12/31/2018	25
	2019	1/27/2020	12/31/2019	27
	2020	1/25/2021	12/31/2020	25

Sumber : Hasil Olah *Microsoft Exel 2022*

Berdasarkan Tabel 6 diatas, pada tahun 2016 rata-rata *audit delay* perusahaan sampel berjumlah 41 hari, pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 47 hari, pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan menjadi 45 hari, disusul tahun 2019 mengalami penurunan yaitu 42 hari, dan pada tahun 2020 rata-rata *audit delay* mengalami peningkatan berjumlah 60 hari. Jumlah hari *audit delay* maksimum pada tahun 2016 yaitu Bank Mega Syariah sebesar 83 hari dan jumlah hari minimumnya yaitu BCA Syariah sebesar 6 hari. Pada tahun 2017 Bank Bank Mega Syariah memiliki *audit delay* tertinggi yaitu 85 hari sedangkan *audit delay* terendah dicapai oleh Bank Jabar Banten Syariah sebesar 17 hari. Pada tahun 2018 BRI Syariah memiliki *audit delay* tertinggi yaitu 84 hari sedangkan *audit delay* terendah dicapai oleh Bank Syariah Mandiri

sebesar 18 hari. Kemudian pada tahun 2019 BTPN Syariah tertinggi yaitu 65 hari sedangkan *audit delay* terendah dicapai oleh Bank Syariah Mandiri sebesar 18 hari. Adapun terakhir tahun 2020 Bank Victoria Syariah memiliki *audit delay* tertinggi yaitu 120 hari sedangkan *audit delay* terendah dicapai oleh Bank Syariah Mandiri sebesar 18 hari.

#### **b. Komite Audit Perbankan Syariah Tahun 2016-2020**

Komite audit ini merupakan orang yang melakukan pengawasan terhadap perusahaan. Adanya komite audit diharapkan mampu mengontrol dan memonitor keputusan yang dilakukan manajer itu sudah benar yang berarti bahwa keputusan tidak memihak suatu pihak, namun mengikat semua pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan (Thesarani, 2016). Menurut Sarafina dan Saifi (2017), untuk menghitung proporsi komite audit dalam perusahaan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Komite Audit} = \text{Total Komite audit}$$

Contoh: BRI Syariah 2016 Komite Audit =5 orang

Berdasarkan contoh di atas dapat dilihat bahwa total komite audit adalah 5 orang. Berikut adalah data total komite audit 2016-2020 Bank Perbankan Syariah 2016-2020:

**Table 8. Komite Audit Perbankan Syariah Tahun 2016-2020**

<b>Nama Bank</b>	<b>Tahun</b>	<b>Total Komite Audit</b>
BRI Syariah	2016	5
	2017	5
	2018	6
	2019	5
	2020	5
BNI Syariah	2016	6
	2017	4
	2018	3

<b>Nama Bank</b>	<b>Tahun</b>	<b>Total Komite Audit</b>
	2019	6
	2020	6
Bank Syariah Mandiri	2016	6
	2017	7
	2018	7
	2019	7
	2020	7
Bank Muamalat	2016	4
	2017	3
	2018	4
	2019	3
	2020	3
Bank Panin Dubai Syariah	2016	3
	2017	3
	2018	3
	2019	3
	2020	3
Bank Mega Syariah	2016	3
	2017	3
	2018	3
	2019	3
	2020	3
Bank BTPN Syariah	2016	5
	2017	4
	2018	4
	2019	4
	2020	3
Bank Bukopin Syariah	2016	3
	2017	3
	2018	2
	2019	3
	2020	4
Bank Jabar Bantesn Syariah	2016	4
	2017	4
	2018	6
	2019	5
	2020	5
Bank Victoria Syariah	2016	3
	2017	3
	2018	4

<b>Nama Bank</b>	<b>Tahun</b>	<b>Total Komite Audit</b>
	2019	4
	2020	4
BCA Syariah	2016	3
	2017	3
	2018	3
	2019	3
	2020	3

Sumber : Hasil Olah *Microsoft Exel 2022*

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat jumlah komisaris total komite audit adalah 4 orang dalam setiap perusahaan perbankan syariah.

### c. Ukuran Dewan Komisaris Perbankan Syariah Tahun 2016-2020

Dewan komisaris adalah bagian dari organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG (KNKG, 2016). Pengukuran Dewan Komisaris menurut Sihotang (2017) adalah Ukuran Dewan Komisaris = Jumlah Anggota Dewan Komisaris, berikut dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Contoh BRI Syariah: Jumlah Anggota Dewan Komisaris pada tahun 2016 adalah 5 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dewan komisaris perbankan syariah 2016-2020 pada tabel dibawah ini:

**Table 9. Dewan Komisaris Perbankan Syariah 2016-2020**

<b>Nama Bank</b>	<b>Tahun</b>	<b>Komisaris (X1)</b>
BRI Syariah	2016	5
	2017	4
	2018	4
	2019	4
	2020	2
BNI Syariah	2016	6
	2017	8
	2018	4

<b>Nama Bank</b>	<b>Tahun</b>	<b>Komisaris (X1)</b>
	2019	5
	2020	4
Bank Syariah Mandiri	2016	5
	2017	4
	2018	3
	2019	4
	2020	5
Bank Muamalat	2016	4
	2017	3
	2018	5
	2019	5
	2020	5
Bank Panin Dubai Syariah	2016	3
	2017	3
	2018	3
	2019	3
	2020	3
Bank Mega Syariah	2016	3
	2017	3
	2018	3
	2019	3
	2020	3
Bank BTPN Syariah	2016	3
	2017	4
	2018	4
	2019	5
	2020	4
Bank Bukopin Syariah	2016	4
	2017	4
	2018	4
	2019	3
	2020	3
Bank Jabar Bantesn Syariah	2016	4
	2017	4
	2018	4
	2019	3
	2020	3
Bank Victoria Syariah	2016	3
	2017	3
	2018	3

Nama Bank	Tahun	Komisaris (X1)
	2019	3
	2020	3
BCA Syariah	2016	3
	2017	3
	2018	3
	2019	3
	2020	4

Sumber : Hasil Olah *Microsoft Exel 2022*

Berdasarkan tabel 9 diatas dapat dilihat bahwa rata-rata nilai ukuran dewan komisaris 2016-2022 adalah 4. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris pada perusahaan sektor perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 diaudit oleh KAP Nasional berafiliasi dengan KAP International *non big four* dan kriterianya Reputasi Auditor Besar.

#### d. Kepemilikan Manajerial pada Perbankan Syariah Tahun 2016-2020

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham (Tjeleni, 2013). Menurut Asmiran (2013) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial adalah “*the proportion of total shares by the member of directors*”. Maka kepemilikan manajerial dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah Saham dimiliki Manajemen}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100$$

$$\text{Contoh Bank Muamalat 2016} = \frac{358.500.000}{1.103.435.151.000} \times 100 = 0,00032$$

Berdasarkan nilai kepemilikan manajerial Bank Muamalat pada tahun 2016 didapatkan jumlah saham dimiliki manajemen sebesar Rp.358.500.000, nilai jumlah saham beredari Bank Muamalat pada tahun

2016 adalah Rp. 1.103.435.151.000, maka Kepemilikan manarial Bank Muamalat adalah 0,00032, untuk lebih jelasnya data perbankan Syariah 2016-2020 dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

**Table 10. Kepemilikan Manajerial pada Perbankan Syariah Tahun 2016-2020**

<b>Nama Bank</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Saham dimiliki</b>	<b>Jumlah Saham Beredar</b>	<b>KM</b>
BRI Syariah	2016	Rp -	Rp 1,979,000,000,000	0
	2017	Rp -	Rp 3,958,000,000,000	0
	2018	Rp -	Rp 9,716,113,498,000	0
	2019	Rp -	Rp 9,716,113,498,000	0
	2020	Rp -	Rp 9,900,508,698,000	0
BNI Syariah	2016	Rp -	Rp 1,501,500,000,000	0
	2017	Rp -	Rp 2,501,500,000,000	0
	2018	Rp -	Rp 2,501,500,000,000	0
	2019	Rp -	Rp 2,501,500,000,000	0
	2020	Rp -	Rp 2,921,000,000,000	0
Bank Syariah Mandiri	2016	Rp -	Rp 1,989,021,935,000	0
	2017	Rp -	Rp 2,489,022,000,000	0
	2018	Rp -	Rp 2,989,022,000,000	0
	2019	Rp -	Rp 2,989,022,000,000	0
	2020	Rp -	Rp 3,142,018,680,000	0
Bank Muamalat	2016	Rp 358,500,000	Rp 1,103,435,151,000	0,000324894
	2017	Rp 472,980,000	Rp 1,103,435,151,000	0,000428643
	2018	Rp 472,980,000	Rp 1,103,435,151,000	0,000428643
	2019	Rp 472,980,000	Rp 1,103,435,151,000	0,000428643
	2020	Rp 472,980,000	Rp 1,103,435,151,000	0,000428643
Bank Panin Dubai Syariah	2016	Rp -	Rp 991,952,541,000	0
	2017	Rp -	Rp 1,019,533,525,600	0
	2018	Rp -	Rp 2,395,903,785,100	0
	2019	Rp -	Rp 2,395,903,785,100	0
	2020	Rp -	Rp 3,881,364,131,900	0
Bank Mega Syariah	2016	Rp -	Rp 847,114,000,000	0
	2017	Rp -	Rp 847,114,000,000	0
	2018	Rp -	Rp 847,114,000,000	0
	2019	Rp -	Rp 847,114,000,000	0
	2020	Rp -	Rp 1,150,000,000,000	0
Bank	2016	Rp -	Rp 693,333,000,000	0

<b>Nama Bank</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Saham dimiliki</b>	<b>Jumlah Saham Beredar</b>	<b>KM</b>
BTPN Syariah	2017	Rp -	Rp 693,333,000,000	0
	2018	Rp -	Rp 770,370,000,000	0
	2019	Rp -	Rp 770,370,000,000	0
	2020	Rp -	Rp 770,370,000,000	0
Bank Bukopin Syariah	2016	Rp 81,370,000,000	Rp 750,370,000,000	0,108439836
	2017	Rp 81,370,000,000	Rp 1,050,370,000,000	0,07746794
	2018	Rp 81,370,000,000	Rp 1,050,370,000,000	0,07746794
	2019	Rp 81,370,000,000	Rp 1,050,370,000,000	0,07746794
	2020	Rp 81,370,000,000	Rp 1,050,370,000,000	0,07746794
Bank Jabar Banten Syariah	2016	Rp -	Rp 1,009,000,000,000	0
	2017	Rp -	Rp 1,259,000,000,000	0
	2018	Rp -	Rp 1,259,000,000,000	0
	2019	Rp -	Rp 1,845,890,124,000	0
	2020	Rp -	Rp 1,510,890,124,000	0
Bank Victoria Syariah	2016	Rp -	Rp 210,000,000,000	0
	2017	Rp -	Rp 270,000,000,000	0
	2018	Rp -	Rp 310,000,000,000	0
	2019	Rp -	Rp 360,000,000,000	0
	2020	Rp -	Rp 360,000,000,000	0
BCA Syariah	2016	Rp 1,892,970,000	Rp 996,300,000,000	0,0019
	2017	Rp 1,892,970,000	Rp 996,300,000,000	0,0019
	2018	Rp 1,892,970,000	Rp 996,300,000,000	0,0019
	2019	Rp 3,792,970,000	Rp 1,996,300,000,000	0,0019
	2020	Rp 4,284,848,093	Rp 2,255,183,207,000	0,0019

Sumber : Hasil Olah *Microsoft Exel 2022*

Berdasarkan tabel 10 diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata banyak BRI syariah, BNI Syariah, Mandiri Syariah, Panin Dubay Syariah, Mega Syariah, BTPN Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Victoria Syariah tidak memiliki jumlah saham dimiliki perorangan 2016 sampai 2020. Sementara yang memiliki jumlah saham yaitu hanya Bank Muamalat, Bukopin Syariah dan BCA syariah. Jumlah saham beredar paling banyak yaitu pada Bank Bank BRI syariah pada tahun 2020 Rp.

9.900.508.698.000, sementara jumlah minimal saham beredar yaitu pada Bank Bank Victoria Syariah 2016 sebanyak Rp. 210.000.000.000.

**e. Dewan Pengawas Syariah Pada Perbankan Syariah Tahun 2016-2020**

Dewan Pengawas Syariah ialah suatu badan yang mempunyai tugas untuk mengawasi jalannya operasional lembaga keuangan syariah supaya sesuai dengan ketentuan syariah yang sudah di fatwakan oleh DSN (Andri, 2019). Pengukuran Dewan Pengawas Syariah, dalam penelitian ini menggunakan Jumlah Anggota DPS dihitung berdasarkan jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah dari masing-masing bank umum syariah di Indonesia pada setiap akhir tahun (Nomran et al., 2018: 174–187). Menggunakan rumus sebagai berikut:

Jumlah Anggota DPS (SIZE) =  $\sum$  Anggota DPS pada setiap akhir tahun

Contoh BRI Syariah 2016 = Anggota DPS 2 orang

Untuk lebih jelasnya maka dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

**Table 11. Dewan Pengawas Syariah Pada Perbankan Syariah Tahun 2016-2020**

<b>Nama Bank</b>	<b>Tahun</b>	<b>DPS</b>
BRI Syariah	2016	2
	2017	2
	2018	2
	2019	2
	2020	2
BNI Syariah	2016	2
	2017	2
	2018	2
	2019	3
	2020	2
Bank Syariah Mandiri	2016	3
	2017	3
	2018	3

<b>Nama Bank</b>	<b>Tahun</b>	<b>DPS</b>
	2019	3
	2020	3
Bank Muamalat	2016	3
	2017	3
	2018	3
	2019	2
	2020	2
Bank Panin Dubay Syariah	2016	2
	2017	2
	2018	2
	2019	2
	2020	2
Bank Mega Syariah	2016	3
	2017	2
	2018	2
	2019	2
	2020	2
Bank BTPN Syariah	2016	2
	2017	2
	2018	2
	2019	2
	2020	2
Bank Bukopin Syariah	2016	2
	2017	2
	2018	2
	2019	2
	2020	2
Bank Jabar Bantesn Syariah	2016	3
	2017	3
	2018	3
	2019	2
	2020	2
Bank Victoria Syariah	2016	2
	2017	2
	2018	2
	2019	2
	2020	2
BCA Syariah	2016	2
	2017	2
	2018	2

Nama Bank	Tahun	DPS
	2019	2
	2020	2

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata dewan pengawas syariah yang ada pada perbankan syariah 2016-2020 adalah berjumlah sebanyak 2 orang, jumlah maksimal yang dimiliki oleh bank Syariah mandiri tahun 2016-2020 memiliki dewan pengawsan syariah sebanyak 3 orang.

## 2. Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif pada penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran tentang data penelitian secara umum kepada para pembaca laporan keuangan (Hadi, 2016). Dalam penelitian ini pengukuran statistik deskriptif berupa nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi. Tujuan dari analisis ini yaitu untuk lebih mudah dalam melihat gambaran secara umum mengenai variabel yang diteliti, berikut tabel yang menjelaskan variabel secara statistik.

**Table 12. Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dewan Komisaris	55	2	8	3.75	1.004
Kepemilikan Manajerial	55	.00000	.10844	.0078155	.02450386
Komite Audit	55	.20000	.85714	.4171429	.13215052
Dewan Pengawas Syariah	55	2	3	2.24	.429
<i>Audit delay</i>	55	6	120	47.09	25.270
Valid N (listwise)	55				

Sumber: Data olahan SPSS 24, 2022

Tabel 12 di atas dapat diketahui bahwa sampel penelitian (N) berjumlah 55 sampel untuk setiap variabel yang diteliti. Variabel dewan komisaris diperoleh nilai minimum 2 yang berarti dewan komisaris sangat tidak besar, sedangkan nilai maksimum 8 menunjukkan bahwa dewan komisaris sangat besar yang dalam pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat. Secara keseluruhan perusahaan dalam penelitian ini memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3.75 dan standar deviasi sebesar 1.004.

Variabel Kepemilikan Manajerial dalam penelitian ini memiliki nilai minimum sebesar 0 dan maksimal 0,10 yang artinya manajer tidak memiliki jumlah saham yang dimiliki dan maksimal manajer memiliki jumlah saham 0,10. Secara keseluruhan perusahaan dalam penelitian ini memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,0078 dan standar deviasi sebesar 0,024.

Variabel komite audit diperoleh nilai minimum 0,2 yang berarti komite audit sangat tidak besar, sedangkan nilai maksimum 0,85 menunjukkan bahwa komite audit sangat kecil dalam penunjang dewan komisaris perusahaan dalam menjalankan tugas yang dimiliki sebagai pihak yang melindungi pihak luar perusahaan dari kecurangan manajemen perusahaan. Secara keseluruhan perusahaan dalam penelitian ini memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,417 dan standar deviasi sebesar 0,132.

Variabel dewan pengawas syariah diperoleh nilai minimum 2 yang berarti dewan pengawas syariah tidak besar, sedangkan nilai maksimum 3 menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah sangat besar dalam mengawasi aktivitas keuangan **syariah** di Indonesia agar berjalan sesuai dengan prinsip

atau syariat Islam. Secara keseluruhan perusahaan dalam penelitian ini memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 2,24 dan standar deviasi sebesar 0,429.

Variabel *Audit delay* dalam penelitian ini memiliki nilai minimum sebesar 6 hari dan nilai maksimum sebesar 120 hari. Nilai minimum sebesar 6 hari artinya lamanya laporan hasil auditor dikeluarkan pada perusahaan paling cepat yaitu 6 hari, dan paling lama 120 hari. Perusahaan yang tercepat melaporkan laporan hasil auditannya yaitu Bank BCA Syariah selama 6 hari. Sedangkan perusahaan yang paling lama melaporkan laporan hasil auditannya yaitu Bank Bank Victoria Syariah selama 120 hari.

### **3. Uji Asumsi Klasik**

#### **a. Uji Normalitas**

Uji normalitas dilakukan dengan maksud memeriksa apakah terdistribusi normal atau tidak. Menurut Ghozali (2011) pedoman yang dipakai dalam uji normalitas ini adalah menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* yaitu :

- 1) Jika nilai sig atau signifikansi atau nilai probabilitas ( $p$ )  $< 0,05$  (taraf kepercayaan 95 %), distribusi adalah tidak normal.
- 2) Jika nilai sig atau signifikansi atau nilai probabilitas ( $p$ )  $> 0,05$  (taraf kepercayaan 95 %), distribusi adalah normal.

Adapun hasil pengolahan data untuk uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 13 sebagai berikut :

Table 13. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		55
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	23.12334833
Most Extreme Differences	Absolute	.098
	Positive	.098
	Negative	-.077
Test Statistic		.098
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

**Sumber: Data sekunder diolah tahun 2022**

Dari Tabel 13 diketahui bahwa nilai Asym.Sig (2-tailed) untuk unstandardized residual sebesar 0,200, dapat disimpulkan bahwa nilai Asym.Sig (2-tailed) dalam penelitian ini nilainya lebih besar dari tingkat signifikan yang digunakan pada penelitian yaitu ( $\alpha = 0,05$ ). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel penelitian berdistribusi normal, dengan demikian analisis regresi linear berganda dapat dilaksanakan karena data telah berdistribusi normal.

#### **b. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolonieritas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan korelasi antar variabel independen. Jika tidak terjadi korelasi antar variabel independen maka dapat dikatakan bahwa model regresi tersebut baik. Untuk mengetahui adanya multikolonieritas, dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai *cut-off* yang biasa dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* < 0,1 dan nilai VIF <10. Hasil uji multikolonieritas dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini.

Table 14. Uji Multikolenieritas

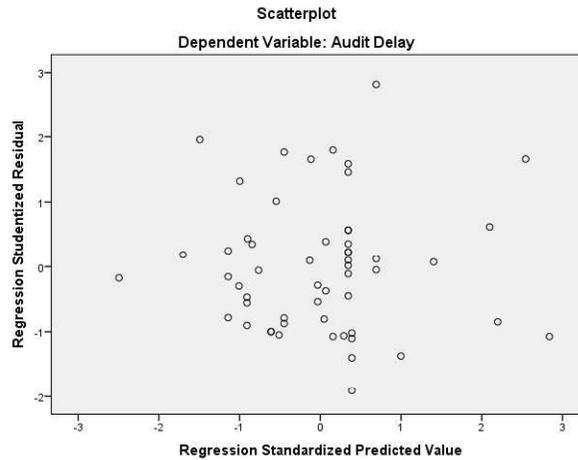
Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>	
Komite Audit	0,668	1.498	Tidak Multikolinearitas
Ukuran Dewan Komisaris	0,819	1.220	Tidak Multikolinearitas
Kepemilikan Manajerial	0,958	1.044	Tidak Multikolinearitas
Dewan Pengawas Syariah	0,784	1.275	Tidak Multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji multikolenieritas tabel 14, dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* semua variable penelitian adalah  $> 0,1$  yang berarti bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Hasil yang sama dilihat dari nilai VIF semua variabel menunjukkan angka dibawah 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari multikolenieritas antar variabel

### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel pengganggu dari suatu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Jika *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas.

**Gambar 4.1**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**



*Sumber: Data sekunder diolah tahun 2022*

Berdasarkan gambar 4.1 ditemukan penyebaran data tidak teratur, hal tersebut terlihat pada plot yang menyebar atau terpecar dan tidak membentuk pola tertentu, hal ini dapat disimpulkan tidak ada terjadi kasus heterokedastisitas, maka dapat disimpulkan tidak ada terjadi heterokedastisitas maka penelitian dapat dilanjutkan.

#### **d. Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode sebelumnya ( $t-1$ ). Pengujian terhadap ada tidaknya gejala autokorelasi dideteksi dengan menggunakan uji Durbin Watson (DW), dengan pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi sebagai berikut:

$H_0 : P = 0$  (tidak ada autokorelasi)

$H_a : P \neq 0$  (ada autokorelasi)

**Table 15. Pengambilan Keputusan Autokorelasi**

Jika Nilai DW	Keputusan
$dl < DW < 4-dl$	Ho diterima Ha ditolak artinya tidak ada autokorelasi
$DW < dl$	Ha diterima Ho ditolak artinya ada autokorelasi positif
$dl < DW < du$	Tidak dapat disimpulkan
$4-dl < DW$	Ho diterima Ha ditolak artinya ada autokorelasi negative
$4-du < DW < dl$	Tidak dapat disimpulkan

Sumber: Imam Ghozali (2011:110)

**Table 16. Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.425 <sup>a</sup>	.180	.115	24.098	1.668
a. Predictors: (Constant), Dewan Pengawas Syariah, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris, Komite Audit					
b. Dependent Variable: <i>Audit delay</i>					

Sumber: Data sekunder diolah tahun 2022

Pada tabel 16 menunjukkan nilai dw sebesar 1,668,  $dl < DW < 4-dl$  lebih kecil dari batas (dl) 1.413 dan kecil dari  $4-(4-dl) = 2,587$ , maka dapat disimpulkan bahwa  $1.413 < 1,668 < 2,587$ , artinya menolak  $H_0$  yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif (lihat tabel keputusan) atau dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

#### 4. Teknik Analisis Data

##### a. Analisis Regresi Linear berganda

Analisis regresi linier berganda menjelaskan pengaruh antara variabel komite audit (X1), Ukuran Dewan Komisaris (X2), kepemilikan manajerial (X3) dan dewan pengawas syariah (X4) secara bersama-sama dengan belanja modal pemerintah daerah (Y) sebagai berikut:

Table 17. Regresi Linear Berganda

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	1.922	.202		9.537	.000
	Komite Audit	.157	.030	.299	2.936	.049
	Dewan Komisaris	.040	.034	.002	.013	.990
	Kepemilikan Manajerial	1.874	1.390	.179	1.348	.184
	Dewan Pengawas Syariah	-.044	.088	-.074	-.500	.619

Dependent Variable: LOG Y

Sumber: Data sekunder diolah tahun 2022

Pada tabel koefisien 17 dapat dilihat bahwa nilai konstanta (a) adalah 1.922 sedangkan koefisien regresi komite audit (bX1) sebesar 0.157, koefisien Ukuran Dewan Komisaris (bX2) sebesar 0.400, koefisien Kepemilikan Manajerial (bX3) sebesar 1.874 dan Dewan Pengawas Syariah (bX4) sebesar -0.044. Hasil dari analisis linear berganda tersebut dapat dimasukkan kedalam persamaan regresi sebagai berikut:

$$AD = 1.922 + 0.157KA + 0.400DK + 1.874KM - 0.044DPS + e$$

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Konstanta sebesar 1.922 menunjukkan bahwa nilai variabel independen dan interaksi variabel independen dianggap nol maka *audit delay* sebesar 1.922.
- 2) Koefisien variabel komite audit sebesar 0,157, artinya apabila terjadi kenaikan nilai komite audit sebesar 1 level maka akan meningkatkan *audit delay* sebesar 0,157.
- 3) Koefisien variabel ukuran dewan komisaris sebesar 0.400, artinya apabila terjadi kenaikan nilai ukuran dewan komisaris sebesar 1 level maka akan meningkatkan *audit delay* sebesar -0.400

- 4) Koefisien variabel kepemilikan manajerial sebesar 1.874, artinya apabila terjadi kenaikan kepemilikan manajerial sebesar 1 level akan menaikkan *audit delay* sebesar 1.874.
- 5) Koefisien variabel dewan pengawas syariah sebesar - 0.044, artinya apabila terjadi kenaikan nilai dewan pengawas syariah sebesar 1 level maka akan menurunkan *audit delay* sebesar - 0.044.

**b. Koefisiensi Determinasi ( $R^2$ )**

Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel komite audit, ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial dan dewan pengawas syariah terhadap *audit delay*, dapat dilihat sebagai berikut:

**Table 18. Hasil Analisis Determinan (Model Summary)**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.425 <sup>a</sup>	.180	.115	24.098
a. Predictors: (Constant), Dewan Pengawas Syariah, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit				
b. Dependent Variable: <i>Audit delay</i>				

Sumber: Data sekunder diolah tahun 2022

Berdasarkan tabel 18 diatas diperoleh R sebesar 0,115 yaitu terdapat hubungan yang kuat positif antara variabel independen (komite audit, ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial dan dewan pengawas syariah) dengan variabel dependen (*audit delay*) dan nilai koefisien determinansi atau *adjusted R<sup>2</sup>* (R Square) sebesar 0,115 atau (11,5%). Hal ini menunjukkan bahwa persentase hubungan pengaruh variabel independen seraca bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen sebesar 11,5%,

sisanya 88,5% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk model penelitian ini.

## 5. Uji Hipotesis

### a. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan uji t digunakan untuk melihat pengaruh secara satu per satu atau secara parsial. Hasil pengujian parsial dapat dilihat pada tabel 4.6 sehingga dapat disimpulkan bahwa :

**Table 19. Hasil Uji t**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	1.922	.202		9.537	.000
	Komite Audit	.157	.030	.299	2.936	.049
	Dewan Komisaris	.040	.034	.002	.013	.990
	Kepemilikan Manajerial	1.874	1.390	.179	1.348	.184
	Dewan Pengawas Syariah	-.044	.088	-.074	-.500	.619

Dependent Variable: LOG Y

Sumber: Data sekunder diolah tahun 2022

Dari keempat variabel independen yang dimasukkan kedalam model regresi ditemukan hasil sebagai berikut:

#### 1) Hasil uji t komite audit

Hasil perhitungan yang didapat pada tabel 19 variabel komite audit secara statistik menunjukkan hasil yang signifikan pada nilai lebih kecil dari  $\alpha$  ( $0,049 < 0,05$ ). Sedangkan nilai t hitung  $X_1 = 2,936$  dan t tabel sebesar 2.008 sehingga t hitung  $>$  t tabel ( $2,936 > 2.008$ ). Maka H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variable komite audit berpengaruh

positif dan signifikan terhadap *audit delay* Pada Perusahaan Perbankan Syariah di BEI tahun 2016-2020

2) Hasil uji t Ukuran Dewan Komisaris

Hasil perhitungan yang didapat pada tabel 19 ukuran dewan komisaris secara statistik menunjukkan hasil yang signifikan pada nilai lebih besar dari  $\alpha$  ( $0,990 > 0,05$ ). Sedangkan nilai t hitung  $X_2 = 0,013$  dan t tabel sebesar 2.008 sehingga t hitung  $>$  t tabel ( $0,013 > 2.008$ ). Maka  $H_2$  diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variable ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *audit delay* pada Perusahaan Perbankan Syariah di BEI tahun 2016-2020

3) Hasil uji t Kepemilikan Manajerial

Hasil perhitungan yang didapat pada tabel 19 kepemilikan manajerial secara statistik menunjukkan hasil yang signifikan pada nilai lebih besar dari  $\alpha$  ( $0,184 > 0,05$ ). Sedangkan nilai t hitung  $X_3 = 1.348$  dan t tabel sebesar 2.008 sehingga t hitung  $<$  t tabel ( $1.348 < 2.008$ ). Maka  $H_3$  ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variable kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *audit delay* pada Perusahaan Perbankan Syariah di BEI tahun 2016-2020

4) Hasil uji t Dewan Pengawas Syariah

Hasil perhitungan yang didapat pada tabel 19 ukuran dewan pengawas syariah secara statistik menunjukkan hasil yang signifikan pada nilai lebih besar dari  $\alpha$  ( $0,619 > 0,05$ ). Sedangkan nilai t hitung  $X_4 = -0,500$  dan t tabel sebesar 2.008 sehingga t hitung  $>$  t tabel ( $-0,500 > 2.008$ ). Maka  $H_4$  diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variable dewan pengawas

syariah berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap *audit delay* Pada Perusahaan Perbankan Syariah di BEI tahun 2016-2020

#### b. Uji f

Hasil perhitungan regresi secara bersama-sama antara variabel komite audit, ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial dan dewan pengawas syariah terhadap *audit delay* dilakukan dengan menggunakan uji F sebagai berikut:

**Table 20. Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.639	4	.160	2.753	.038 <sup>b</sup>
	Residual	2.903	50	.058		
	Total	3.543	54			
a. Dependent Variable: LOG_Y						
b. Predictors: (Constant), Dewan Pengawas Syariah, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris, Komite Audit						

Berdasarkan tabel 20 diperoleh nilai F hitung sebesar 2.753 dengan signifikan 0,038 nilainya lebih kecil dari tingkat signifikan  $\alpha$  5% (0,05), atau dilihat dari F hitung lebih besar pada F tabel  $2.753 > 2.55$  Artinya bahwa komite audit, ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial dan dewan pengawas syariah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit delay* Pada Perusahaan Perbankan Syariah di BEI tahun 2016-2020.

### C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan pengolahan data dengan program SPSS 24 dapat diketahui bahwa:

#### 1. Pengaruh Komite Audit Terhadap *Audit delay*

Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit delay* Pada Perusahaan Perbankan Syariah di BEI tahun 2016-2020. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,049 berarti tingkat signifikansinya dibawah 0,05 dan nilai t hitung > t tabel ( $2,936 > 2.008$ ) maka H1 diterima.

Hal ini berarti bahwa komite audit yang lebih sering memberikan suatu mekanisme pengawasan dan pemantauan kegiatan keuangan yang lebih efektif, meliputi persiapan dan pelaporan informasi keuangan perusahaan. Pertemuan komite audit secara umum disimpulkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui fungsi pengawasan dan pemberian saran khususnya agar dapat meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Jumlah rata-rata komite audit pada setiap perusahaan sudah mematuhi peraturan yang dikeluarkan OJK. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja komite audit dalam melakukan tugasnya sudah maksimal. Komite audit sudah secara maksimal menjalankan fungsinya sehingga jumlah komite audit yang besar berpengaruh terhadap *audit report lag* perusahaan. Semasa komite audit masih mendapat manfaat dari perusahaan, maka independensinya akan mudah diwujudkan (Hamdani, 2016).

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh komisaris dalam membantu pelaksanaan tanggung jawab serta fungsi pengawasan terhadap perusahaan. Komite audit juga berperan sebagai faktor upaya dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan perusahaan serta sebagai hasil dari pelaksanaan kebijakan serta tanggungjawab di antara hubungan antara manajemen, komite audit, dan auditor eksternal sehingga dapat menerapkan mekanisme dari *good corporate governance* (Purba, 2018). Semakin meningkatnya pelaksanaan *good corporate governance* menjelaskan bahwa hubungan dari komite audit sebagai pengukuran dari *good corporate governance* terhadap *audit delay* ialah positif. Semakin banyak komite audit maka pengawasan akan lebih meningkat yang menandakan sesuai dengan prinsip *good corporate governance* maka waktu pelaksanaan audit akan lebih singkat dan cepat terselesaikan sehingga terjadinya *audit delay* akan semakin kecil (Eksandy, 2017).

Penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan Robert Jao, (2018) komite audit memiliki pengaruh dan signifikan terhadap *audit delay*. Hal ini menunjukkan jumlah komite audit akan mempersingkat waktu penyampaian laporan auditor independen. Hasil penelitian menjelaskan secara parsial rapat komite audit mempengaruhi *audit delay* secara positif

## **2. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap *Audit delay***

Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,990 berarti tingkat signifikansinya diatas 0,05 dan nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , yaitu  $0,013 < 2.008$  maka H2 ditolak. Hasil dari analisis statistik menggambarkan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Normalita, Hendra, & Suhendro (2020) yang menjelaskan bahwa sedikit banyaknya jumlah dewan komisaris dalam suatu perusahaan tidak mempengaruhi *audit delay* perusahaan. Jumlah dewan komisaris tidak dapat menjamin keefektifan dalam melakukan pengawasan terhadap *audit delay* perusahaan. Pembentukan dewan komisaris dalam suatu perusahaan didasari pada bahwa perusahaan harus membentuk dewan komisaris. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Muhammad & Henri (2021) Dewan komisaris berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor industri penghasil bahan baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2019. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Kusumah & Manurung (2017) dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap audit report lag.

### **3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap *Audit delay***

Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,184 berarti tingkat signifikansinya diatas 0,05 dan nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , yaitu  $1.348 < 2.008$  maka H3 ditolak.

Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen perusahaan, maka manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain dirinya sendiri. Perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial cenderung menuntut ketepatan waktu dalam mempublikasikan laporan auditan. Namun adanya kepemilikan saham manajerial akan mendorong manajer untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan karena mereka ikut merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan ikut menanggung kerugian dari pengambilan keputusan yang salah, sehingga penyampaian laporan audit semakin lama.

Hasil mengindikasikan bahwa keberadaan kepemilikan manajerial dalam perusahaan belum secara maksimal memberikan kontribusi atau tidak menjamin kecepatan auditor dalam menyampaikan laporan auditan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya kepemilikan manajerial belum mampu mempengaruhi *audit delay*. Swami & Latrini (2013) sejalan dengan penelitian ini yang menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan tidak signifikan pada *audit report lag*. Hal tersebut berarti, ada atau tidaknya kepemilikan manajerial tidak akan mempengaruhi panjangnya audit report lag dalam suatu perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan Robert (2018) didapatkan hasil bahwa Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap *audit delay*. Kepemilikan saham yang dimiliki manajer belum mampu memengaruhi cepat lambatnya penyampaian laporan auditor independen. Penelitian ini sejalan dengan

penelitian Swami & Latrini (2015) bahwa ada kecenderungan variabel kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan tidak signifikan pada Audit Report Lag. Hal tersebut berarti, ada atau tidaknya kepemilikan manajerial tidak akan mempengaruhi panjangnya Audit Report Lag dalam suatu perusahaan.

#### **4. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap *Audit delay***

Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,619 berarti tingkat signifikansinya diatas 0,05 dan nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , yaitu  $-0,500 < 2.008$  maka H4 ditolak.

Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel DPS tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Dengan demikian adanya keberadaan DPS tidak menentukan terhadap peningkatan *audit delay*. Tinggi rendahnya tingkat pengawasan yang dilakukan oleh DPS, tidak mampu dipengaruhi *audit delay* perbankan syariah. Semakin rendah pengawasan dari DPS terhadap perbankan syariah, maka semakin rendah pula peningkatan kinerja perbankan syariah.

Artinya bahwa fungsi dan peran dewan pengawas syariah hanya berkisar pada pengawasan dan penilaian dari aspek syariah terhadap operasional, produk dan jasa perbankan syariah (Farida, 2018). Disamping fungsi dan perannya dewan pengawas syariah juga mempunyai rangkap jabatan sebagai dewan pengawas syariah dibank lain, Sehingga kinerja dewan pengawas syariah dianggap kurang baik dan tidak mempengaruhi

*audit delay* perbankan (Eskandy, 2018). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori *Shariah Enterprise Theory* menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam kegiatan operasional usaha untuk mengawasi kepatuhan akan prinsip-prinsip syariah

Hasil yang sama dilakukan oleh Intia & Azizah (2021) didapatkan hasil bahwa Dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, bahwa kenaikan atau penurunan jumlah dewan pengawas syariah tidak dapat mempengaruhi hasil *audit delay*. Hal ini dikarenakan fungsi dan peran dewan pengawas syariah hanya berkisar pada pengawasan dan penilaian, dewan pengawas syariah juga mempunyai rangkap jabatan sebagai dewan pengawas syariah dibank lain, Sehingga kinerja dewan pengawas syariah dianggap kurang baik dan tidak mempengaruhi *audit delay* perbankan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab IV telah dijabarkan mengenai output penelitian pengolahan data beserta pembahasan didalamnya. Bab V menyampaikan berupa kesimpulan, dan saran.

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka penelitian ini berhasil menemukan bahwa:

1. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variable komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit delay* pada Perusahaan Perbankan Syariah di BEI tahun 2016-2020.
2. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variable ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay* pada Perusahaan Perbankan Syariah di BEI tahun 2016-2020.
3. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variable kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay* pada Perusahaan Perbankan Syariah di BEI tahun 2016-2020.
4. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variable dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay* pada Perusahaan Perbankan Syariah di BEI tahun 2016-2020.

#### **B. Keterbatasan**

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya agar memperoleh hasil yang lebih baik. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel independen (komite audit, ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial dan dewan pengawas syariah) yang digunakan dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan variabel dependen *audit delay* sebesar 11,5% sehingga masih terdapat 88,5% faktor yang belum dijelaskan dalam penelitian ini.
2. Sampel hanya menggunakan Bank Umum Syariah sehingga bukti empiris yang telah dihasilkan tidak dapat digeneralisasikan dalam menilai audit delay pada sektor yang berbeda.
3. Variabel independen yang digunakan hanya terfokus pada faktor internal yang ada pada perusahaan saja. Faktor-faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi audit delay, seperti kompleksitas operasi, tipe auditor dan spesialisasi auditor belum dijadikan sebagai variabel penelitian.

### C. Saran

1. Bagi Penelitian selanjutnya agar dapat memperbaiki nilai Adjusted R Square yang sangat rendah, seperti variabel kompleksitas perusahaan yang berkaitan dengan banyak atau sedikitnya transaksi perusahaan tersebut, variabel lainnya seperti opini audit pada tahun sebelumnya
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah proksi *karakteristik corporate governance* yang lain seperti, kompetensi komite audit, frekuensi rapat dewan direksi, dan variabel lain yang berpengaruh terhadap *audit delay*.
3. Penelitian selanjutnya menambah variabel kualitas audit karena memiliki peranan penting yang strategis dalam memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan untuk menjaga system pengawasan

perusahaan serta penerapan *good corporate governance* yang lebih baik dan dapat mencegah konflik keagenan, juga dapat meningkatkan kinerja keuangan.

4. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah observasi penelitian dari sektor yang berbeda dan menggunakan pengukuran yang berbeda apabila ingin menguji kembali variabel yang tidak dapat dibuktikan tersebut dengan melihat berbagai literature yang ada.
5. Dalam menangani *audit delay* yang menyebabkan keterlambatan penyampaian laporan keuangan pada Bursa Efek, maka perusahaan dalam hal ini diusahakan mampu agar meminimalisir pembuatan laporan keuangan sedini mungkin dan sesuai dengan standar akuntansi dan penyertaan data yang valid agar proses auditnya tidak memakan waktu lama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, H. (2018). *Auditing (dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan percetakan STIM YKPN.
- Abdul, H. T. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual untuk SKPD*. Bandung: Alfabeta.
- Abdullah, F. (2014). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan. Edisi Pertama. Cetakan ketiga*. Malang: UMN Press.
- Abernathy, J. L., Barnes, M., Stefaniak, C., & Weisbarth, A. (2016). *An International Perspective on Audit Report Lag: A Synthesis of the Literature and Opportunities for Future Research*. *International Journal of Auditing*, 21(1), 100–127.
- Adhika Wijasari, L. K., & Ary Wirajaya, I. G. (2021). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fenomena Audit Delay di Bursa Efek Indonesia*. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(1), 168.
- Agoes, S. (2016). *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik. Edisi 4*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Agoes, S. (2017). *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik. Edisi 4*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Agoes, S., & Ardana, C. (2014). *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya. Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Agus, S. (2017). *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi Edisi Keempat*. Yogyakarta: BPFPE.
- Anam, K. (2017). *Determinan yang Mempengaruhi Audit Report Lag: Studi Pada Perusahaan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 1, 94.
- Andri, S. (2019). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, cet. 1*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Apadore, K., & Mohd Noor, M. (2013). *Determinants of Audit Report Lag and Corporate Governance in Malaysia*. *International Journal of Business and Management*, 8(15), 151–163.
- Arifin, Z. (2015). *Teori Keuangan Dan Pasar Modal*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Arikunto, S. (2017). *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*.

- Aryaningsih, B. (2014). *Pengaruh Total Aset, Tingkat Solvabilitas dan Opini Audit pada Audit Delay*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 7, 747.
- Astuti, D. (2019). *Manajemen Keuangan Perusahaan, Cetakan Pertama*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Azizah, J., & Erinos. (2020). *Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Perbankan Syariah (Studi Empiris Pada Perbankan Syariah Tahun 2014-2018)*. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2554–2569.
- Azizah, J., & Erinosi. (2020). *Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit, Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Perbankan Syariah (Studi Empiris Pada Perbankan Syariah Tahun 2014-2018)*. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1).
- Bernandhi. (2017). *Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Dividen, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan*. Skripsi tidak dipublikasikan Universitas Diponegoro Semarang.
- Boyhton, Johnson, dan K. (2015). *Modern Auditing. 7 ed. Cisarar*. Jakarta: Erlangga.
- Brealey, M., & Marcus. (2008). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.
- cnbcindonesia.com. (2021). *No Title*.
- dan Rasmini, P. (2016). *Pengaruh Audit Tenure, Pergantian Auditor Dan Financial Distress Pada Audit Delay Pada Perusahaan Consumer Goods*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- David M, H. A., & Butar, S. B. (2020). *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Reputasi KAP, Karakteristik Perusahaan dan Opini Audit terhadap Audit Delay*. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 18(1), 1.
- Eksandy. (2017). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Solvabilitas, Profitabilitas Dan Komite Audit Terhadap Audit delay Competitive*. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*.
- Eksandy, A. (2018). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syariah Indonesia*. *Jurnal Akuntansi*, 5(1).
- Fadillah, A. R. (2017). *Analisis Pengaruh Dewan Komisaris Independen,*

- Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Perusahaan Yang Terdaftar Di Lq45. Jurnal Akuntansi, 12(1), 37–52.*  
Diambil dari <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak>
- Fahmi, I. (2016). *Analisis Laporan Keuangan. Cetakan Ke-2*. Bandung: Alfabeta.
- Faishal, M., & Hadiprajitno, P. B. (2015). *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Audit Report Lag. Diponegoro Journal of Accounting, 4(4), 239–249.*
- Farida. (2018). *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance dan Pengungkapan Islamic Social Reporting Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia, 10(1).*
- Fritria. (2016). *Pengaruh Tingkat Kesulitan Keuangan (Financial Distress) dan Good Corporate Governance Terhadap Konservatisme Akuntansi. STIE Perbanas, 1(1).*
- Ghozali, I. (2013). *Analisis Multivariate dengan program IBSM SPSS21. Semarang: Universitas Diponegoro.*
- Gibson. (2016). *Struktur Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Jakarta.
- Hamdani. (2016). *Good Corporate Governance (Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Herry, S. dan K. (2013). *Umam, Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Intia, L. C., & Azizah, S. N. (2021). *Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia. Jrka, 7(2), 46–59.*
- Jensen, & Meckling. (1976). *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 305 – 360.*
- Kaaroud, M. A., Mohd Ariffin, N., & Ahmad, M. (2020). *The extent of audit report lag and governance mechanisms: Evidence from Islamic banking institutions in Malaysia. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 11(1), 70–89.*
- KNKG. (2016). *Komite Nasional Kebijakan Governance. Good Governance Bisnis Syariah. Komite Nasional Kebijakan Governance*. Jakarta.
- Kusumah, R. W. R., & Manurung, D. (2017). *Peningkah Good Corporate*

- Governance bagi Audit Report Lag? Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(1), 137–148.
- Li, Y. (2014). *The Influence of Corporation Governance Structure on Internal Control Audit Report Lag: Evidence From China. Accounting & Taxation*, 6(2), 101–115. Diambil dari [www.theIBFR.org](http://www.theIBFR.org)
- Lukviarman, N. (2016). *Corporate Governance : Menuju Penguatan Konseptual dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Era Adicitra Intermedia.
- Luthan, L. (2021). *Islamic Corporate Governance: Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Keahlian Keuangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Perilaku Pengambilan Risiko. Wahana Riset Akuntansi*, 9(1), 23.
- Made, N., Nopiardi, R., Putu, N., Mendra, Y., & Saitri, P. W. (2019). *The Influence of Board of Directors , Independent Commissioners , Audit Committee and Managerial Ownership on Integrity of Financial Statements ( Empirical Study on Property and Real Estate Companies Listed on IDX 2017-2019 )*, 540–551.
- Muhammad, I. S., & Henri, A. (2021). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Good Corporate Governance (GCG), dan Kualitas Audit Terhadap Audit Delay. Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(2), 364–383.
- Muhammad, S. A. (2015). *Perbankan Syariah Dari Teori Kepraktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Mulyadi. (2017). *Auditing. Buku I Edisi Ke Enam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Musibah, & Alfattani. (2014). *The Mediating Effect of Financial Performance on The Relationship Between Shariah Supervisory Board Effectiveness, Intellectual Capital and Corporate Social Responsibility, of Islamic Banks in Gulf Cooperation Council Countries." Asian Social Science*, 10(17), 139–164.
- Mustofa, Mohammad, S. P. (2018). *Pengaruh Faktor Keuangan Dan Non Keuangan Terhadap Audit Delay. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 7(6), 1–23.
- Nomran, Haron, & Hassan. (2018). *Bank Performance and Shari'ah Supervisory Board Attributes of Islamic banks: Does Bank Size Matter? Journal of Islamic Finance (Special Issue)*, 174–187.

- Pangestu, D. M. (2014). *Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial, Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Kepemilikan Instusinal terhadap Nilai Perusahaan*.
- Pradipta, A., & Yulius, S. K. (2015). *Faktor-faktor yang mempengaruhi perataan laba*. Jakarta: Media Bisnis. STIE TRISAKTI.
- PTSB. (2013). *Keputusan Direksi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Nomor : PH. 01. 04/ 180/ 2013 Tentang Perubahan atas Surat Keputusan Direksi PT Semen Baturaja (Persero) Nomor : PH. 01. 04/ 034 /2012 Tentang Buku Pedoman Good Corporate Governance (GCG) PT Semen Baturaj*.
- Purba. (2018). *Pengaruh Profitabilitas, Struktur Good Corporate Governance Dan Kualitas Audit Terhadap Audit Delay*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*.
- Putri, S. E., Srimindarti, C., & Hardiningsih, P. (2021). *Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Dan Reputasi Auditor Terhadap Audit Report Lag Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek*, 978–979.
- Putri, & Syahrial. (2019). *Kontribusi Good Corporate Governance untuk Mengurangi Terjadinya Audit Delay*. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, 78–88.
- Putu, N., & Swami, D. (2013). *Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Audit Report Lag*. *E-Jurnal Akuntansi*, 4(3), 530–549.
- Raditya, A. K. (2015). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Audit Report LAG*.
- Raweh, N. A. M. (2019). *Audit Committee Characteristics and Audit Report Lag: Evidence From Oman*. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 9(1), 152.
- Riyanto, B. (2018). *Dasar-Dasar Pembelian Perusahaan*. Yogyakarta: BPFE.
- Robert Jao, F. P. C. (2018). *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Audit Delay*, 4, 11–12.
- Rudianto. (2016). *Pengantar Akuntansi: Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Jakarta: Jakarta.
- Saidah, S. (2014). *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Risiko Perusahaan : Studi Empiris Laporan Tahunan*

- Perusahaan Nonkeuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011- 2013. Jurnal Akuntansi UNESA, 3(1), 1–25.*
- Sekaran, U. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian, Edisi 6, Buku 1, Cetakan Kedua.* Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Sembiring, E. G. G. R. (2017). *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi pada perusahaan Manufaktur sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI Periode. Jom FISIP, 4(2).*
- Simatupang, L., Putra, W., & Ekam & Herawaty, N. (2018). *Perbandingan Pengaruh Ukuran Perusahaan, Opini Audit, Profitabilitas dan Reputasi Kap Terhadap Audit Delay pada Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 6(1), 45–62.*
- Sugiono, P. D. (2017). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif.pdf. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.*
- Sutedi, A. (2016). *Good Corporate Governance.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Suwardjono. (2015). *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan.* Jakarta: Salemba Empat.
- Swami, & Latrini. (2013). *Pengaruh Karakteristik Corporate Governance terhadap Audit Report Lag. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 530–549.*
- Swami, & Latrini. (2013). *Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Audit Report Lag. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.*
- Swami, N. P. D., & Latrini, M. Y. (2015). *Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Audit Report Lag. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 4(3).*
- Utami, W. B., Pardanawati, S. L., & Septianingsih, I. (2018). *Pengaruh Opini Audit, Ukuran KAP, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Perusahaan Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Manufaktur Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017. Proceeding Seminar Nasional and Call for Paper STIE AAS, 136–148.* Diambil dari <http://prosiding.stie-aas.ac.id/index.php/prosenas/article/view/20>
- Wardhani, A. P., & Raharja, S. (2013). *Analisis Pengaruh Corporate Governance*

*Terhadap Audit Report Lag. Diponegoro Journal Of Accounting, 2(3), 766–778.*

Widyati. (2013). *Pengaruh Dewan Direksi, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan. Jurnal Ilmu Manajemen, 1(1), 234–249.*

## MASTER TABEL

Nama Bank	Tahun	Komite Audit (X1)	Komisaris (X2)	KM (X3)	DPS (X3)	Audit Delay (Y)
BRI Syariah	2016	5	5	0	2	48
	2017	5	4	0	2	40
	2018	6	4	0	2	84
	2019	5	4	0	2	34
	2020	5	2	0	2	26
BNI Syariah	2016	6	6	0	2	30
	2017	4	8	0	2	45
	2018	3	4	0	2	32
	2019	6	5	0	3	34
	2020	6	4	0	2	18
Bank Syariah Mandiri	2016	6	5	0	3	30
	2017	7	4	0	3	18
	2018	7	3	0	3	18
	2019	7	4	0	3	18
	2020	7	5	0	3	18
Bank Muamalat	2016	4	4	0.000324894	3	48
	2017	3	3	0.000428643	3	75
	2018	4	5	0.000428643	3	67
	2019	3	5	0.000428643	2	24
	2020	3	5	0.000428643	2	90

Nama Bank	Tahun	Komite Audit (X1)	Komisaris (X2)	KM (X3)	DPS (X3)	Audit Delay (Y)
Bank Panin Dubai Syariah	2016	3	5	0	2	48
	2017	3	4	0	2	59
	2018	3	4	0	2	56
	2019	3	4	0	2	56
	2020	3	2	0	2	88
Bank Mega Syariah	2016	3	6	0	3	83
	2017	3	8	0	2	85
	2018	3	4	0	2	51
	2019	3	5	0	2	64
	2020	3	4	0	2	53
Bank BTPN Syariah	2016	5	5	0	2	39
	2017	4	4	0	2	24
	2018	4	3	0	2	22
	2019	4	4	0	2	65
	2020	3	5	0	2	41
Bank Bukopin Syariah	2016	3	4	0.108439836	2	55
	2017	3	3	0.07746794	2	82
	2018	2	5	0.07746794	2	63
	2019	3	5	0.07746794	2	51
	2020	4	5	0.07746794	2	109
Bank Jabar Banten Syariah	2016	4	3	0	3	27
	2017	4	3	0	3	17

<b>Nama Bank</b>	<b>Tahun</b>	<b>Komite Audit (X1)</b>	<b>Komisaris (X2)</b>	<b>KM (X3)</b>	<b>DPS (X3)</b>	<b>Audit Delay (Y)</b>
	2018	6	3	0	3	25
	2019	5	3	0	2	38
	2020	5	3	0	2	57
	2016	3	3	0	2	40
	2017	3	3	0	2	64
Bank Victoria Syariah	2018	4	3	0	2	53
	2019	4	3	0	2	57
	2020	4	3	0	2	120
	2016	3	3	0.0019	2	6
	2017	3	4	0.0019	2	18
BCA Syariah	2018	3	4	0.0019	2	25
	2019	3	5	0.0019	2	27
	2020	3	4	0.0019	2	25

Lampiran 2

**KOMITE AUDIT**

Nama Bank	Tahun	Total Komite Audit
BRI Syariah	2016	5
	2017	5
	2018	6
	2019	5
	2020	5
BNI Syariah	2016	6
	2017	4
	2018	3
	2019	6
	2020	6
Bank Syariah Mandiri	2016	6
	2017	7
	2018	7
	2019	7
	2020	7
Bank Muamalat	2016	4
	2017	3
	2018	4
	2019	3
	2020	3
Bank Panin Dubay Syariah	2016	3
	2017	3
	2018	3
	2019	3
	2020	3
Bank Mega Syariah	2016	3
	2017	3
	2018	3
	2019	3
	2020	3
Bank BTPN Syariah	2016	5
	2017	4
	2018	4
	2019	4
	2020	3
Bank Bukopin Syariah	2016	3
	2017	3

Nama Bank	Tahun	Total Komite Audit
	2018	2
	2019	3
	2020	4
Bank Jabar Bantesn Syariah	2016	4
	2017	4
	2018	6
	2019	5
	2020	5
Bank Victoria Syariah	2016	3
	2017	3
	2018	4
	2019	4
	2020	4
BCA Syariah	2016	3
	2017	3
	2018	3
	2019	3
	2020	3

## Lampiran 3

## DEWAN KOMISARIS (X2)

<b>Nama Bank</b>	<b>Tahun</b>	<b>Komisaris (X2)</b>
BRI Syariah	2016	5
	2017	4
	2018	4
	2019	4
	2020	2
BNI Syariah	2016	6
	2017	8
	2018	4
	2019	5
	2020	4
Bank Syariah Mandiri	2016	5
	2017	4
	2018	3
	2019	4
	2020	5
Bank Muamalat	2016	4
	2017	3
	2018	5
	2019	5
	2020	5
Bank Panin Dubai Syariah	2016	3
	2017	3
	2018	3
	2019	3
	2020	3
Bank Mega Syariah	2016	3
	2017	3
	2018	3
	2019	3
	2020	3
Bank BTPN Syariah	2016	3
	2017	4
	2018	4
	2019	5
	2020	4
Bank Bukopin Syariah	2016	4
	2017	4

<b>Nama Bank</b>	<b>Tahun</b>	<b>Komisaris (X2)</b>
	2018	4
	2019	3
	2020	3
Bank Jabar Bantesn Syariah	2016	4
	2017	4
	2018	4
	2019	3
	2020	3
Bank Victoria Syariah	2016	3
	2017	3
	2018	3
	2019	3
	2020	3
BCA Syariah	2016	3
	2017	3
	2018	3
	2019	3
	2020	4

Lampiran 4

**KEPEMILIKAN MANAJERIAL (X3)  
DALAM JUTAAN RUPIAH**

<b>Nama Bank</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Saham dimiliki</b>	<b>Jumlah Saham Beredar</b>	<b>KM</b>
BRI Syariah	2016	-	1,979,000,000,000	0
	2017	-	3,958,000,000,000	0
	2018	-	9,716,113,498,000	0
	2019	-	9,716,113,498,000	0
	2020	-	9,900,508,698,000	0
BNI Syariah	2016	-	1,501,500,000,000	0
	2017	-	2,501,500,000,000	0
	2018	-	2,501,500,000,000	0
	2019	-	2,501,500,000,000	0
	2020	-	2,921,000,000,000	0
Bank Syariah Mandiri	2016	-	1,989,021,935,000	0
	2017	-	2,489,022,000,000	0
	2018	-	2,989,022,000,000	0
	2019	-	2,989,022,000,000	0
	2020	-	3,142,018,680,000	0
Bank Muamalat	2016	358,500,000	1,103,435,151,000	0.000324894
	2017	472,980,000	1,103,435,151,000	0.000428643
	2018	472,980,000	1,103,435,151,000	0.000428643

<b>Nama Bank</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Saham dimiliki</b>	<b>Jumlah Saham Beredar</b>	<b>KM</b>
	2019	472,980,000	1,103,435,151,000	0.000428643
	2020	472,980,000	1,103,435,151,000	0.000428643
Bank Panin Dubay Syariah	2016	-	991,952,541,000	0
	2017	-	1,019,533,525,600	0
	2018	-	2,395,903,785,100	0
	2019	-	2,395,903,785,100	0
	2020	-	3,881,364,131,900	0
Bank Mega Syariah	2016	-	847,114,000,000	0
	2017	-	847,114,000,000	0
	2018	-	847,114,000,000	0
	2019	-	847,114,000,000	0
	2020	-	1,150,000,000,000	0
Bank BTPN Syariah	2016	-	693,333,000,000	0
	2017	-	693,333,000,000	0
	2018	-	770,370,000,000	0
	2019	-	770,370,000,000	0
	2020	-	770,370,000,000	0
Bank Bukopin Syariah	2016	81,370,000,000	750,370,000,000	0.108439836
	2017	81,370,000,000	1,050,370,000,000	0.07746794
	2018	81,370,000,000	1,050,370,000,000	0.07746794
	2019	81,370,000,000	1,050,370,000,000	0.07746794
	2020	81,370,000,000	1,050,370,000,000	0.07746794

<b>Nama Bank</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Saham dimiliki</b>	<b>Jumlah Saham Beredar</b>	<b>KM</b>
Bank Jabar Banten Syariah	2016	-	1,009,000,000,000	0
	2017	-	1,259,000,000,000	0
	2018	-	1,259,000,000,000	0
	2019	-	1,845,890,124,000	0
	2020	-	1,510,890,124,000	0
Bank Victoria Syariah	2016	-	210,000,000,000	0
	2017	-	270,000,000,000	0
	2018	-	310,000,000,000	0
	2019	-	360,000,000,000	0
	2020	-	360,000,000,000	0
BCA Syariah	2016	1,892,970,000	996,300,000,000	0.0019
	2017	1,892,970,000	996,300,000,000	0.0019
	2018	1,892,970,000	996,300,000,000	0.0019
	2019	3,792,970,000	1,996,300,000,000	0.0019
	2020	4,284,848,093	2,255,183,207,000	0.0019

**Lampiran 5**

**DEWAN PENGAWAS SYARIAH (X4)**

<b>Nama Bank</b>	<b>Tahun</b>	<b>DPS</b>
BRI Syariah	2016	2
	2017	2
	2018	2
	2019	2
	2020	2
BNI Syariah	2016	2
	2017	2
	2018	2
	2019	3
	2020	2
Bank Syariah Mandiri	2016	3
	2017	3
	2018	3
	2019	3
	2020	3
Bank Muamalat	2016	3
	2017	3
	2018	3
	2019	2
	2020	2
Bank Panin Dubai Syariah	2016	2
	2017	2
	2018	2
	2019	2
	2020	2
Bank Mega Syariah	2016	3
	2017	2
	2018	2
	2019	2
	2020	2
Bank BTPN Syariah	2016	2
	2017	2
	2018	2
	2019	2
	2020	2
Bank Bukopin Syariah	2016	2
	2017	2

<b>Nama Bank</b>	<b>Tahun</b>	<b>DPS</b>
	2018	2
	2019	2
	2020	2
Bank Jabar Bantesn Syariah	2016	3
	2017	3
	2018	3
	2019	2
	2020	2
Bank Victoria Syariah	2016	2
	2017	2
	2018	2
	2019	2
	2020	2
BCA Syariah	2016	2
	2017	2
	2018	2
	2019	2
	2020	2

## Lampiran 6

<b>Nama Bank</b>	<b>Tahun</b>	<b>Tanggal Laporan Audit</b>	<b>Tanggal Laporan Keuangan</b>	<b>Audit Delay</b>
BRI Syariah	2016	Feb-17	Dec-16	48
	2017	Feb-18	Dec-17	40
	2018	Mar-19	Dec-18	84
	2019	Feb-20	Dec-19	34
	2020	Jan-21	Dec-20	26
BNI Syariah	2016	Jan-17	Dec-16	30
	2017	Feb-18	Dec-17	45
	2018	Feb-19	Dec-18	32
	2019	Feb-20	Dec-19	34
	2020	Jan-21	Dec-20	18
Bank Syariah Mandiri	2016	Jan-17	Dec-16	30
	2017	Jan-18	Dec-17	18
	2018	Jan-19	Dec-18	18
	2019	Jan-20	Dec-19	18
	2020	Jan-21	Dec-20	18
Bank Muamalat	2016	Feb-17	Dec-16	48
	2017	Mar-18	Dec-17	75
	2018	Mar-19	Dec-18	67
	2019	Jan-20	Dec-19	24
	2020	Mar-21	Dec-20	90
Bank Panin Dubai Syariah	2016	Feb-17	Dec-16	48
	2017	Feb-18	Dec-17	59
	2018	Feb-19	Dec-18	56
	2019	Feb-20	Dec-19	56
	2020	Mar-21	Dec-20	88
Bank Mega Syariah	2016	Mar-17	Dec-16	83
	2017	Mar-18	Dec-17	85
	2018	Feb-19	Dec-18	51
	2019	Mar-20	Dec-19	64
	2020	Feb-21	Dec-20	53
Bank BTPN Syariah	2016	Feb-17	Dec-16	39
	2017	Jan-18	Dec-17	24
	2018	Jan-19	Dec-18	22
	2019	Mar-20	Dec-19	65
	2020	Feb-21	Dec-20	41
Bank Bukopin Syariah	2016	Feb-17	Dec-16	55
	2017	Mar-18	Dec-17	82
	2018	Mar-19	Dec-18	63

<b>Nama Bank</b>	<b>Tahun</b>	<b>Tanggal Laporan Audit</b>	<b>Tanggal Laporan Keuangan</b>	<b>Audit Delay</b>
	2019	Feb-20	Dec-19	51
	2020	Apr-21	Dec-20	109
Bank Jabar Banten Syariah	2016	Jan-17	Dec-16	27
	2017	Jan-18	Dec-17	17
	2018	Jan-19	Dec-18	25
	2019	Feb-20	Dec-19	38
	2020	Feb-21	Dec-20	57
	Bank Victoria Syariah	2016	Feb-17	Dec-16
2017		Mar-18	Dec-17	64
2018		Feb-19	Dec-18	53
2019		Feb-20	Dec-19	57
2020		Apr-21	Dec-20	120
BCA Syariah	2016	Jan-17	Dec-16	6
	2017	Jan-18	Dec-17	18
	2018	Jan-19	Dec-18	25
	2019	Jan-20	Dec-19	27
	2020	Jan-21	Dec-20	25

## Lampiran 7

## STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dewan Komisaris	55	2	8	3.75	1.004
Kepemilikan Manajerial	55	.00000	.10844	.0078155	.02450386
Komite Audit	55	.20000	.85714	.4171429	.13215052
Dewan Pengawas Syariah	55	2	3	2.24	.429
<i>Audit delay</i>	55	6	120	47.09	25.270
Valid N (listwise)	55				

## UJI NORMALITAS

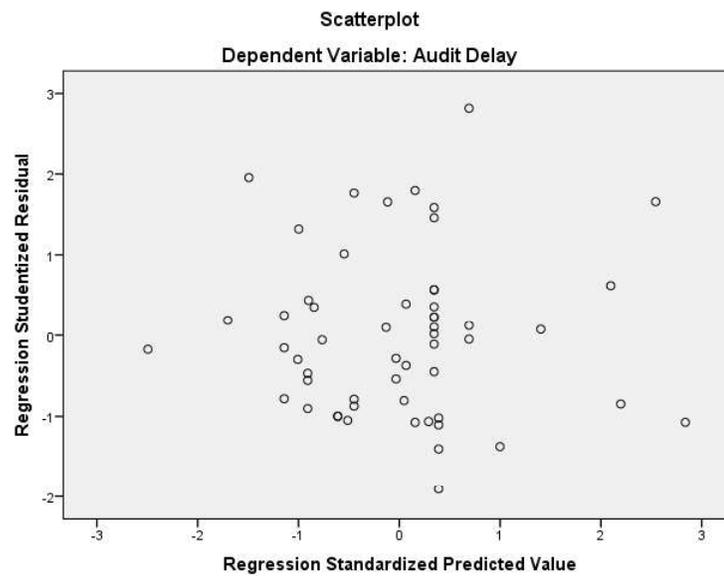
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N	55	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	23.12334833
Most Extreme Differences	Absolute	.098
	Positive	.098
	Negative	-.077
Test Statistic	.098	
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 <sup>c,d</sup>	
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

## UJI MULTIKOLINEARITAS

		Coefficients <sup>a</sup>					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients				
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	77.152	20.090		3.840	.000		
	Komite Audit	-42.419	30.284	-.222	-1.401	.167	.668	1.498
	Ukuran Dewan Komisaris	-1.011	3.598	-.040	-.281	.780	.819	1.220
	Kepemilikan Manajerial	243.666	136.354	.236	1.787	.080	.958	1.044
	Dewan Pengawas Syariah	-4.688	8.613	-.080	-.544	.589	.784	1.275

a. Dependent Variable: Audit Delay

## UJI HETEROSKENDASTISITAS



## UJI AUTOKORELASI

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.425 <sup>a</sup>	.180	.115	24.098	1.668
a. Predictors: (Constant), Dewan Pengawas Syariah, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris, Komite Audit					
b. Dependent Variable: <i>Audit delay</i>					

## Lampiran 8

## ANALISIS DETERMINAN

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.425 <sup>a</sup>	.180	.115	24.098
a. Predictors: (Constant), Dewan Pengawas Syariah, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris, Komite Audit				
b. Dependent Variable: <i>Audit delay</i>				

## REGRESI LINEAR BERGANDA &amp; UJI T

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.922	.202		9.537	.000
	Komite Audit	.157	.030	.299	2.936	.049
	Dewan Komisaris	.040	.034	.002	.013	.990
	Kepemilikan Manajerial	1.874	1.390	.179	1.348	.184
	Dewan Pengawas Syariah	-.044	.088	-.074	-.500	.619
Dependent Variable: LOG_Y						

## UJI F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.639	4	.160	2.753	.038 <sup>b</sup>
	Residual	2.903	50	.058		
	Total	3.543	54			
a. Dependent Variable: LOG_Y						
b. Predictors: (Constant), Dewan Pengawas Syariah, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris, Komite Audit						